



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2014**

TENTANG

**ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan sinergi pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi daerah, perlu adanya *Roadmap* penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, kebijakan penguatan SIDA yang salah satunya adalah *Roadmap* ditetapkan oleh Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014-2016
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan

MEHUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014-2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi
4. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga pcnunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

**BAB U
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH**

Pasal 2

- (1) Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- (2) Susunan Roadmap SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I Kondisi SIDA saat ini;
 - b. BAB II Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA;
 - c. BAB III Kondisi SIDA yang akan dicapai;

- d. BAB IV Strategi dan arah Kebijakan Penguatan SIDA;
e. BAB V Fokus dan Program Prioritas SIDA;
f. BAB VI Rencana Aksi Penguatan SIDA.

**BAB UI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 11 - 11 - 2014

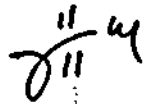
BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 11 Nopember 2014

↳ **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 31 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 - II - 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Grafik	iv
BAB 1 KONDISI SIDA SAAT INI	1
BAB 2 TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA	28
BAB 3 KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI	34
BAB 4 STRATEGI DAN ARAH KEBUAKAN PENGUATAN SIDA	38
BAB 5 FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA	41
BAB 6 RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2012 (Juta Rupiah)	6
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2012 (Juta Rupiah)	6
1.3	Perkembangan Kinerja Pembangunan Pendidikan	8
1.4	Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012	9
1.5	Rasio Penduduk Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja Tahun 2006 s.d. 2012	9
1.6	Jenis Kesenian Dan Kepurbakalaan Di Kabupaten Pacitan	11
1.7	Jenis Cabang Olah Raga Di Kabupaten Pacitan	12
1.8	Sarana Dan Prasarana Olah Raga Kabupaten Pacitan s.d. Tahun 2012	12
1.9	Panjang Jalan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012	13
1.10	Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pacitan 2009 s.d. 2012	14
1.11	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2009 s.d. 2012 Kabupaten Pacitan	14
1.12	Kondisi Cakupan Air Bersih Di Kabupaten Pacitan	15
1.13	Kondisi Dokumen Tata Ruang Di Kabupaten Pacitan	15
1.14	Perkembangan Kondisi Permukiman Di Kabupaten Pacitan	15
1.15	Perkembangan Kondisi Kebersihan Di Kabupaten Pacitan	16
1.16	Jumlah Sarana Dan Prasarana Persampahan Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012	16
1.17	Perkembangan Jaringan Listrik Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012	17
1.18	Banyaknya Satuan Sambungan Telepon (SST) Dan Wartel Tahun 2006 s.d. 2012	17
1.19	Jenis, Kelas, Jumlah Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Pacitan Tahun 2007 s.d. 2012	18
1.20	Wilayah Administratif Kabupaten Pacitan Dirinci Berdasarkan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan	20
1.21	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Menurut Partai Hasil Pemilu Tahun 2014-Kondisi Akhir Periode Tahun 2014-2019	20
1.22	Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Pacitan Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah	21
1.23	Kondisi Saat Ini SIDA Kabupaten Pacitan	22
1.24	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Pacitan	27
3.1	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai Kabupaten Pacitan	34
4.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan	39
5.1	Program Prioritas Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan	41
6.1	Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan Periode 2014-2016	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Peta Administrasi Kabupaten Pacitan	3
1.2	Persentase Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan	4
1.3	Komposisi Penggunaan Lahan Di Kabupaten Pacitan	5
1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pacitan Tahun 2012	10

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan	7

BAB 1

KONDISI SIDA SAAT INI

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan yang semakin tinggi dan adil bagi masyarakat merupakan cita-cita semua pihak. Setiap pengelola pemerintahan daerah pada dasarnya selalu menetapkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari perwujudan pembangunan. Perjalanan sejarah pembangunan menunjukkan bahwa walaupun banyak keserupaan yang dijumpai dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, namun setiap daerah dihadapkan kepada kekhasan tantangan dan faktor multidimensional.

Otonomi daerah sebagai bagian dari proses reformasi di Indonesia diharapkan dapat memperbaiki dan mempercepat proses pencapaian tersebut. Disadari pula bahwa kesejahteraan akan sangat ditentukan oleh daya saing dan kohesi sosial daerah itu sendiri. Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman bahwa daya saing dan kohesi sosial tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam setempat, melainkan faktor “upaya/buatan” (fikir dan ikhtiar), terutama ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus menerus. Oleh karena itu, daya saing dan kohesi sosial suatu daerah semakin ditentukan oleh sistem inovasi daerah dalam upaya mengembangkan potensi spesifik daerahnya.

Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memerlukan proses percepatan pembangunan ekonomi, agar dapat membangun kesejahteraan masyarakatnya serta tidak tertinggal dari daerah lainnya. Menyadari hal tersebut, dalam melaksanakan pembangunan daerah 2014-2016, pendekatan yang dilakukan oleh Kabupaten Pacitan adalah dengan melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa).

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar *stakeholders* pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya di Kabupaten Pacitan. Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi dengan dunia luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka melaksanakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah perlu disusun dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (RPSIDa) yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif.

Roadmap atau Peta Rencana adalah salah satu alat perencanaan berorientasi masa depan atau *foresight* yang merupakan perencanaan dinamis yang mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan. *Foresight* melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan di masa kini untuk mencapainya. (BPPT, 2013).

Roadmap merupakan alat efektif sebagai suatu mekanisme untuk mengintegrasikan beragam elemen organisasi (tatanan kelembagaan tertentu) secara kolaboratif, dalam merencanakan penguatan sistem inovasi secara sistematis.

Dari perspektif berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*) yang ada di Kabupaten Pacitan, *roadmap* dapat berguna terutama karena potensinya dalam memberikan kerangka mekanisme koordinasi dan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menginisiasi tindak lanjut serta sebagai katalis untuk melaksanakan langkah-langkah pembangunan yang disepakati.

Substansi dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pacitan dikembangkan dari Visi dan Misi pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi Tahun 2011-2016 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Visi : *“Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”*, dalam Misi keempat yaitu : *“Meningkatkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Potensi Unggulan”*.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pacitan akan mencerminkan 6 (enam) agenda kebijakan inovasi dalam bentuk indikator-indikator yang berkesesuaian. Pilar prakarsa implementasinya terdiri atas *Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Penguatan Klaster Industri, Penguatan Jaringan Inovasi, Penguatan Teknopreneur dan Pengembangan Tematik Daerah* akan mengerucut ke dalam serangkaian kegiatan pendampingan leknis, pengkajian kebijakan (*action research*) dan intermediasi.

Dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pacitan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan RKPDP yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh program dan kegiatan kolaboratif di Kabupaten Pacitan yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing.

1.2 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Menurut Babat Pacitan nama Pacitan berasal dari kata “ Pacitan ” yang berarti camilan, sedap-sedapan, tambul, yaitu makanan kecil yang tidak sampai mengenyangkan. Hal ini dikarenakan daerah Pacitan merupakan daerah minus, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya tidak sampai mengenyangkan atau tidak cukup. Adapula yang berpendapat bahwa nama Pacitan berasal dari kata “Pace” yang berarti mengkudu (bentis : Jaka) yang memberi kekuatan. Pendapat ini berasal dari legenda yang bersumber pada Perang Mengkubumen atau Perang Palihan Nagari (1746 – 1755) yakni tatkala Pangeran Mangkubumi dalam peperangannya itu sampai di daerah Pacitan. Dalam suatu pertempuran ia kalah terpaksa melarikan diri ke dalam hutan dengan tubuh lemah lesu. Berkat pertolongan abadinya bemama Setroketipo yang memberikan buah pace masak kemudian menjadikan kekuatan Mangkubumi pulih kembali. Akan tetapi nampaknya nama Pacitan yang menggambarkan kondisi daerah Pacitan yang minus itulah yang lebih kuat. Hal itu dikarenakan pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645) nama tersebut telah muncul dalam babat Momana.

Pacitan berasal dari dua kata dalam bahasa jawa yaitu “ Mencit dan Wetan”, artinya daerah yang sangat jauh di sebelah timur, sedangkan sebelah timur yang dimaksud adalah sebelah timur Kasultanan Jogyakarta dan Kasunanan Surakarta, karena Pacitan dulu adalah bumi merdekanya Jogyakarta dan Surakarta. Dalam Perang Palihan nama Pacitan berasal dari Pace Sapangetan, yaitu pada saat Pangeran Mangkubumi terpukul mundur oleh Belanda. Dalam kondisi lunglai lari ke arah timur kerajaan dan bertemu dengan Setroketipo. Pada saat itu Setroketipo memberi minuman “Rucuh Pace”, seketika itu badannya menjadi segar dan sehat, maka Pangeran Mangkubumi berjanji pada Setroketipo dengan bahasa jawa *“Suk nek ana rejane zaman, pace sakpangetan sun jenengke Pacitan”*.

Saat ini Bupati Pacitan dijabat oleh INDARTATO dan Wakil Bupati Pacitan dijabat oleh SOEDJONO (pengganti PRAYITNO sebagai Wakil Bupati yang meninggal dunia tahun 2013).

1.2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Secara geografis luas Kabupaten Pacitan adalah 1.389,8716 Km², yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal serta terletak diantara 07° 55' - 08° 17' Lintang Selatan 110° dan 55' - 111° 25' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

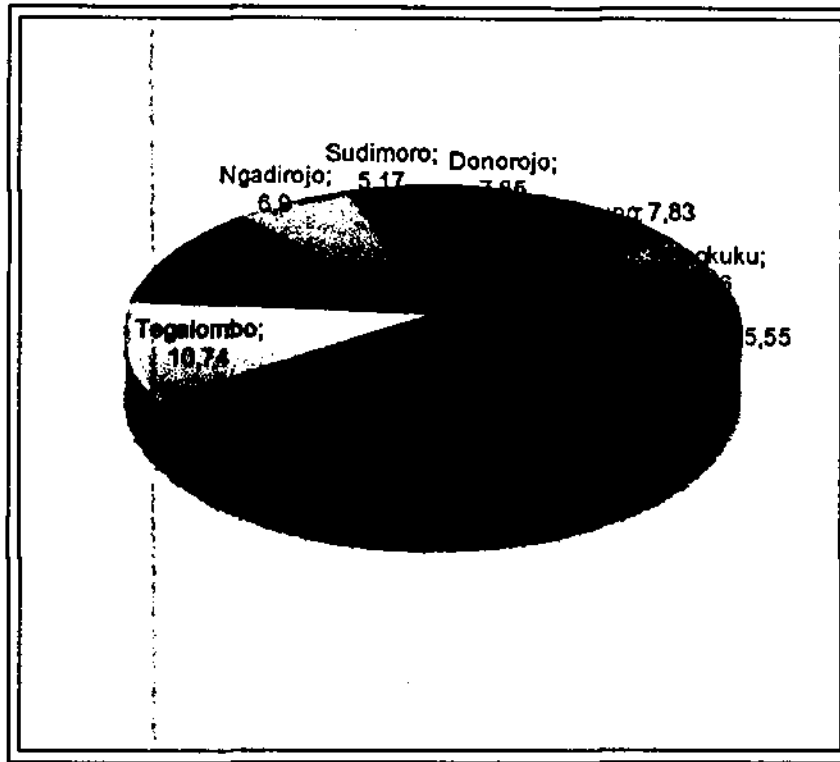
- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek.

Kabupaten Pacitan pada dasarnya terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi fisik alamnya sebagian besar terdiri dari perbukitan yaitu kurang lebih 85% berupa gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kondisi tersebut membawa konsekwensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Secara Administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan yaitu 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro dengan luas wilayah 71,86 Km².

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Pacitan



Gambar 1.2
Persentase Luas Wilayah Administrasi Per Kecamatan

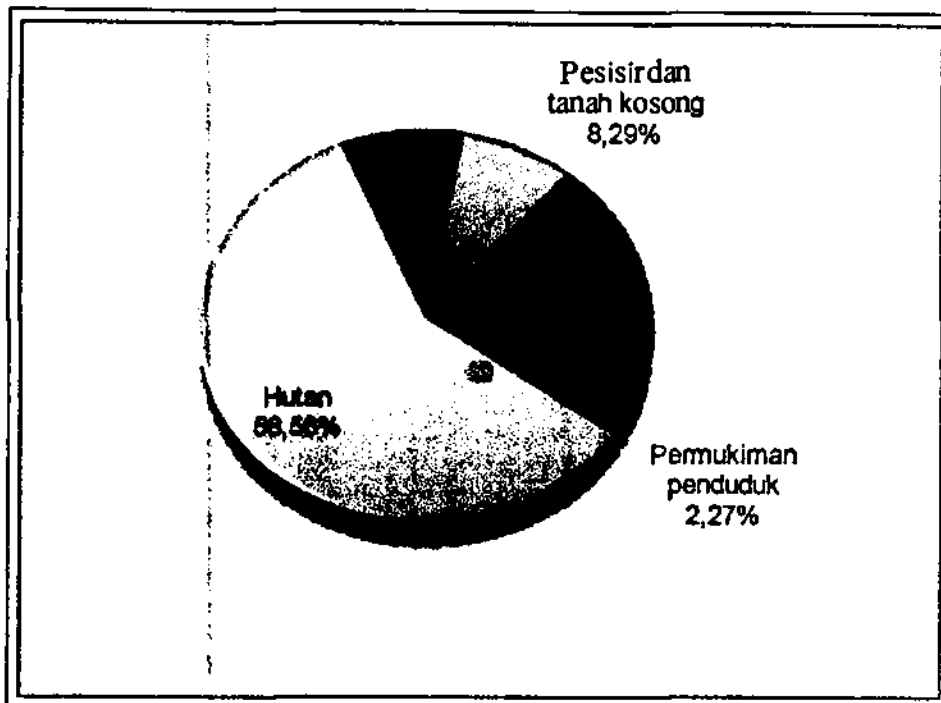


Sumber : Pacitan Dalam Angka 2009

1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Penggunaan lahan di Kabupaten Pacitan didominasi oleh kawasan hutan (58,56%), tanah ladang (21,51%), sawah (9,36%), pesisir dan tanah kosong (8,29%) serta permukiman penduduk (2,27%). Kabupaten Pacitan mempunyai kondisi lahan yang kurang subur. Hal ini ditandai dengan adanya kategori lahan kritis seluas 18,68% atau hampir seperlima dari luas wilayah Kabupaten Pacitan. Lahan kritis ini termasuk ke dalam areal produksi yaitu pada hutan rakyat. Luasnya lahan kritis di Kabupaten Pacitan merupakan salah satu hambatan bagi pengembangan sektor pertanian khususnya sub sektor kehutanan, sehingga sulit untuk dapat meningkatkan produksi setiap komoditi dari sub sektor kehutanan tersebut.

Gambar 1.3
Komposisi Penggunaan Lahan Di Kabupaten Pacitan



Sumber : Pacitan Dalam Angka 2009

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah mana di Kabupaten Pacitan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Iklim

Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara rata-rata berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1°C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%. Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³.

3. Kerentanan Kabupaten Pacitan Terhadap Potensi Bencana

Kabupaten Pacitan yang memiliki kondisi geografis yang beragam menjadikannya banyak menyimpan potensi bencana. Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Pacitan antara lain :

1. Gempa Bumi;
2. Tanah Longsor / Gerakan Tanah;
3. Gelombang Pasang dan Tsunami;
4. Banjir.

4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan menurut hasil registrasi penduduk Tahun 2012 berjumlah 586.595 jiwa, yang terdiri dari 291.550 orang laki-laki (49,70%) dan 295.045 orang perempuan (50,30%). Sedangkan menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010), di Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 543.391 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebesar 264.587 jiwa (48,69 persen) dan perempuan sebesar 78.804 jiwa (51,31persen). Kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2012 sebesar 422 jiwa/Km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pacitan sebagai

ibukota Kabupaten yang mencapai 929 jiwa/Km². Hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 238-539 jiwa/Km². Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Pacitan cukup beragam, diantaranya sebagai pengusaha, pedagang, buruh, petani, nelayan, tukang dan lain-lain.

1.2.2 ASPEK EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada 2012 ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK)2000, yang mengalami sedikit kenaikan dari 6,67 persen pada 2011 menjadi 6,72 persen pada 2012.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2012 (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	860.541,77	955.544,98	1.069.592,41	1.170.876,82	1.275.568,25	1.390.157,30	1.536.013,62
2	Pertambangan A Penggalian	72.524,06	80.436,06	91.955,15	101.824,41	111.683,39	121.660,39	134.771,06
3	Industri Pengolahan	75.071,93	87.963,51	101.751,12	112.693,33	128.094,51	140.963,00	155.556,47
4	Listrik, Gas, A Air Bersih	21.772,84	24.897,61	28.794,32	32.939,67	37.522,95	40.879,25	44.078,60
5	Bangunan	126.375,93	146.796,30	177.935,51	211.084,34	274.194,69	332.325,45	395.031,18
6	Perdagangan, Hotel A Restoran	213.213,15	244.506,57	294.378,43	340.431,15	413.804,90	486.455,16	566.625,80
7	Angkutan A Komunikasi	137.024,83	152.985,05	182.906,28	203.242,83	220.533,07	243.059,05	268.452,42
8	Kouangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	158.492,61	178.494,77	205.560,05	225.541,48	263.552,32	299.759,68	341.386,55
9	Jasa-Jasa	389.435,35	449.804,85	526.649,189	587.674,40	628.255,05	686.355,05	755.701,04
NILAI PDRB ADHB		3.054.452,48	2.321.429,71	2.679.522,45	2.986.311,03	3.553.210,13	3.741.641,33	4.197.613,74

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2012 (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	531.240,03	548.224,37	563.086,05	591.126,24	613.885,63	635.330,48	654.847,29
2	Pertambangan dan Penggalian	52.092,18	55.134,87	57.462,41	61.009,72	65.877,32	69.394,95	73.618,9
3	Industri Pengolahan	43.687,06	47.318,29	50.288,03	51.497,06	54.682,53	57.371,61	60.709,84
4	Listrik, Gas dan Air bersih	10.459,90	11.642,45	12.691,02	13.809,26	14.982,19	16.061,55	17.022,81
5	Bangunan/ Konstruksi	90.890,49	97.970,02	107.546,91	117.765,07	131.713,77	149.733,99	170.681,78
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	126.763,20	137.040,04	149.770,76	162.879,40	184.700,34	208.392,02	233.941,81
7	Pengangkutan dan Komunikasi	63.104,59	65.160,63	70.211,89	74.732,10	79.762,08	85.912,69	93.170,62
8	Kouangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	109.995,37	116.430,03	123.040,03	128.939,94	141.575,72	154.055,15	167.440,95
9	Jasa - jasa	205.949,00	218.988,45	236.106,32	251.555,23	261.642,99	275.313,63	291.108,91
NILAI PDRB ADHK		1.234.181,84	1.297.909,34	1.370.203,62	1.453.314,02	1.548.222,77	1.651.466,07	1.762.542,97

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan

1. PDRB Per Kapita

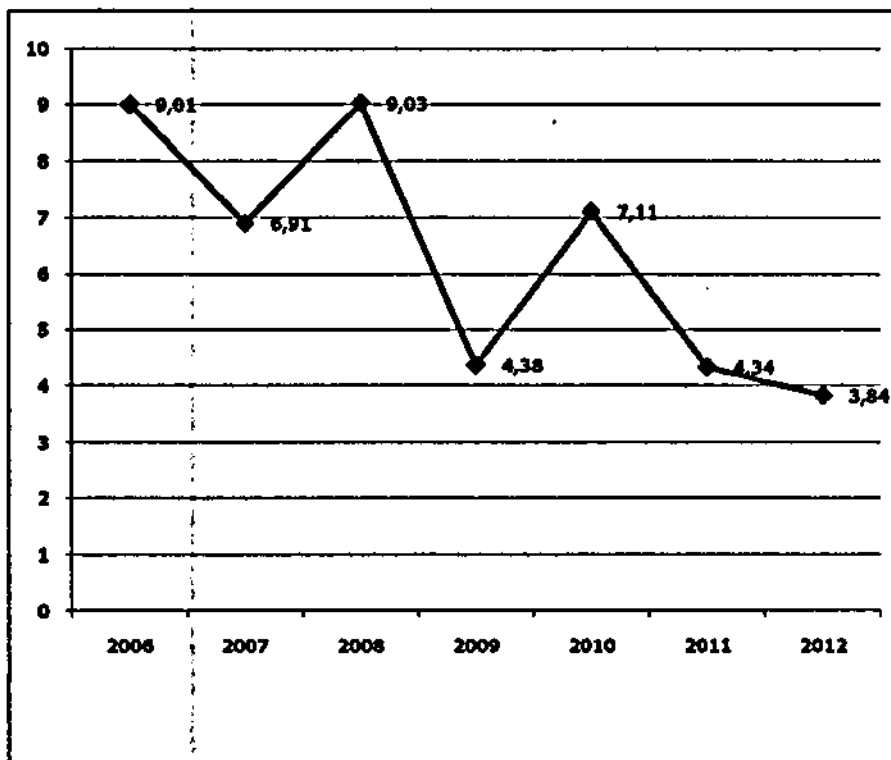
Berdasarkan data BPS Kabupaten Pacitan, PDRB per kapita merupakan hasil perhitungan PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Pacitan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2008 sebesar Rp.4.810.382,32 dan pada Tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp.5.345.643,42 sementara pada Tahun 2010 meningkat menjadi Rp.6.199.533,97. Sedangkan realisasi Tahun 2011 Rp.6.404.282,47 dan Tahun 2012 sebesar Rp.7.198.872,06.

2. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah prosentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada Tahun 2008 angka inflasi mencapai angka tertinggi selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan global sehingga mempengaruhi faktor-faktor ekonomi daerah.

Di bawah ini disajikan grafik perkembangan inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012 sebagai berikut :

Grafik 1.1
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan



Sumber : BPS Kabupaten Pacitan

1.2.3 ASPEK SOSIAL BUDAYA

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan.

Tabel 1.3
Perkembangan Kinerja Pembangunan Pendidikan

NO	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	REALISASI							
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	%	9,70	19,00	33,00	41,15	41,18	45,04	52,63
		2	APK TK	%	27,52	36,24	37,76	38,55	40,13	42	50,8
2	Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1	APK SD/MI	%	105,00	103,99	102,02	103,52	103,10	103,1	103,11
			APK SMP/MTs	%	91,97	95,86	95,82	96,90	96,50	97,25	97,34
		2	APM SD/MI	%	93,85	95,01	97,83	98,67	98,17	98,21	98,91
			APM SMP/MTs	%	72,67	74,20	76,06	81,44	81,58	82,49	82,72
		3	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,20	1,22	0,51	0,51	0,47	0,13	0,66
		4	Angka Lulusan SD/MI	%	99,87	100,00	99,85	100,00	100,00	100	98,49
	Angka Lulusan SMP/MTs	%	99,63	99,55	99,08	99,81	99,87	99,85	99,46		
3	Program Pendidikan Menengah	1	APK SMA/MA/SMK/paket C	%	49,43	50,98	59,69	66,24	67,15	68,05	68,35
		2	APM SMA/MA/SMK/paket C	%	35,63	36,91	40,70	52,57	53,05	54,5	55,38
		3	Angka Putus Sekolah	%	2,41	1,65	0,90	0,62	0,60	0,3	0,98
		4	Angka Lulusan	%	98,94	94,58	97,45	99,79	99,79	99,79	99,87
4	Program Pendidikan Non Formal	1	% garapan kejar paket A	%	90,00	93,00	96,88	97,00	98,75	98,83	98,88
		2	% garapan kejar paket B	%	80,00	86,00	87,15	88,00	90,00	91,23	91,42
		3	% garapan kejar paket C	%	81,00	86,50	87,15	88,00	90,00	91,13	91,24
		4	% Peningkatan Angka Melek Huruf	%	98,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
5	Program Pendidikan Luar Biasa	1	% Jml Sarana Prasarana SLB yang tersedia	%	35,00	38,00	45,00	50,00	55,00	59,85	64,25
		2	% Kebutuhan perlengkapan sekolah	%	33,23	38,77	44,13	49,53	55,00	61,73	65

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

2. Kesehatan

Sebagai salah satu penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kualitas kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui RSUD, Puskesmas, Poliklinik, RS Bersalin, Posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya. Selain itu secara berkala juga dilakukan pemeriksaan kualitas lingkungan di pemukiman, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes) termasuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Askeskin dan sebagainya.

Tabel 1.4
Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Pacitan
Tahun 2006 s.d. 2012

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,4	70,67	70,83	71,04	71,26	71,48	71,69
2	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	188,81	101,20	52,92	79,57	128,93	105,17	95,01
3	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Permil)	15,45	15,61	11,11	14,06	12,38	11,57	11,40
4	Gizi Buruk (%)	0,69	0,16	0,37	0,55	0,13	0,14	0,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

3. Kemiskinan

Kesejahteraan sosial identik dengan permasalahan kemiskinan. Dengan mengetahui jumlah penduduk miskin, maka dapat dipantau tentang keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada usaha penanggulangan kemiskinan. Dalam hal tingkat kemiskinan, Kabupaten Pacitan masih tergolong tinggi. Angka penduduk miskinnya dikarenakan angka tersebut masih berada di atas angka kemiskinan nasional. Namun selama 4 (empat) Tahun terakhir jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu pada tahun 2006 mencapai 26,94% dan menurun menjadi 24,74% pada Tahun 2007. Pada Tahun 2008 sebesar 21,17% Tahun 2009 sebesar 19,01% dan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2010 menurun menjadi 16,90% atau 91.347 jiwa.

4. Kesempatan Kerja

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk usia kerja juga akan mengalami peningkatan. Keadaan tersebut jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Pada Tahun 2012 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan berjumlah 58.244 orang dengan komposisi pencari kerja laki-laki sebanyak 75,5 persen dan perempuan sebesar 24,5 persen. Jumlah pencari kerja ini mengalami kenaikan sebesar 121,65 persen dibandingkan Tahun 2011 yang sebesar 26.278 orang. Sebagian besar pencari kerja adalah lulusan SMTP Umum disusul dengan lulusan SD.

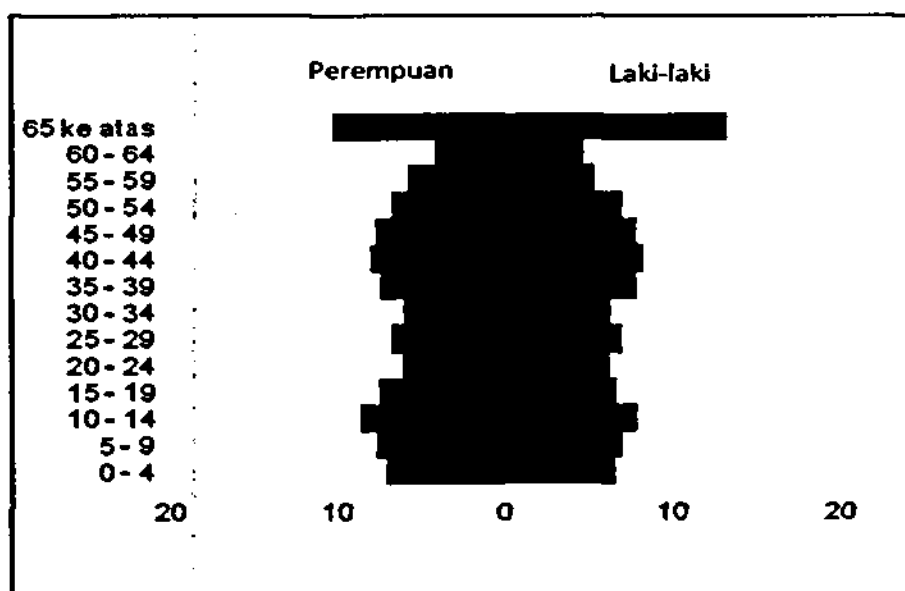
Tabel 1.5
Rasio Penduduk Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja
Tahun 2006 s.d. 2012

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja	318.309	368.230	367.120	373.142	347.306	284.344	334.499
2	Angkatan Kerja	330.137	378.537	378.866	378.136	350.337	292.225	338.425
3	Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,96	0,97	0,97	0,99	0,99	0,97	0,99

Sumber : BPS Kabupaten Pacitan Diolah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2006, prosentase penduduk yang bekerja sebesar 96%, meningkat menjadi 99% pada Tahun 2010. Sedangkan prosentase penduduk yang bekerja pada realisasi Tahun 2011 menurun menjadi 97% dan meningkat kembali pada Tahun 2012 menjadi 99%. Berdasarkan data hasil SP2010 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk pertengahan tahun pada Tahun dasar 2010, diketahui bahwa komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) jumlahnya cenderung meningkat, dari sekitar 11,16% dari total penduduk pada Tahun 2006 menjadi sekitar 11,75% pada Tahun 2010. Hal serupa juga tampak pada penduduk kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya meningkat dari 21,15% dari total penduduk pada Tahun 2006 menjadi sekitar 22,15% pada Tahun 2010. Rasio ketergantungan total pada Tahun dasar 2010 di Kabupaten Pacitan sebesar 51,29, yang artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 51,29 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 33,52, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 17,77. Kelompok umur Tahun 2012 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut ini :

Gambar 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Pacitan Tahun 2012



Sumber : BPS Kabupaten Pacitan

5. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas selama Tahun 2013 berdasarkan data Kepolisian Resort Pacitan yang dirilis menunjukkan prosentase angka kriminalitas di Pacitan mengalami penurunan sebanyak 14,1 persen. Berdasarkan rilis tersebut, pada Tahun 2013 angka kriminalitas yang terjadi di Pacitan mencapai 122 kasus dan jumlah pelapor, sementara hingga akhir desember 2013 kasus yang berhasil diselesaikan oleh Kepolisian sebanyak 93 kasus. Angka tersebut mengalami penurunan mengingat pada Tahun 2012 angka kriminalitas di Pacitan mencapai 142 kasus. Dari 122 kasus kriminal yang ditangani pihak kepolisian, kasus kategori pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi kasus tertinggi di Pacitan, yakni mencapai angka 31 pelapor, dimana hingga saat ini pihak kepolisian telah berhasil menyelesaikan 22 kasus curat tersebut. Sementara penanganan kasus perjudian berada di peringkat kedua dengan 19 kasus, dimana hingga saat ini Kepolisian berhasil menyelesaikan 15 kasus judi.

Tabel 1.7
Jenis Cabang Olah Raga Di Kabupaten Pacitan

NO	CABANG OLAH RAGA	KETERANGAN
1	Atletik	Aktif
2	Sepak Bola	Aktif
3	Bola Basket	Aktif
4	Bridge	Aktif dan Berprestasi
5	Catur	Aktif dan Berprestasi
6	Panahan	Aktif
7	Bulu Tangkis	Aktif
8	Tenis Meja	Aktif
9	Renang	Aktif
10	Bola Voli	Aktif dan Berprestasi
11	Pencak Silat	Aktif
12	Tenes Lapangan	Aktif
13	Dayung	Aktif
14	Karate	Aktif
15	Drum Band	Aktif
16	Bilyard	Aktif
17	Angkat Besi	Aktif dan Berprestasi
18	Sepak Takrow	Aktif dan Berprestasi
19	Gulat	Aktif

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pacitan

Sedangkan untuk di bidang olah raga perlu digali olahragawan dan cabang olahraga daerah yang menonjol dan berprestasi untuk dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama baik daerah. Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda melalui even seleksi pemuda berprestasi dan guna meningkatkan prestasi olah raga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olah raga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul olahragawan yang berprestasi. Adapun sarana olah raga yang mendukung cabang olah raga di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2010 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.8 berikut ini :

Tabel 1.S
Sarana Dan Prasarana Olah Raga Kabupaten Pacitan s.d. Tahun 2012

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	Stadion	2	Kec. Pacitan Kec. Arjosari	
2.	Lap. Bola Volly	4	Kec. Pacitan	Disetiap kecamatan terdapat banyak lapangan bola volly yang dikelola oleh Kec./Desa setempat
3.	Lapangan Bola Basket	1	Kec. Pacitan	Hampir setiap SLTA memiliki lap. bola basket
4.	Lapangan Tennis	3	Kec. Pacitan Kec.Nawangan	

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	LOKASI	KETERANGAN
5.	Lapangan Bulu Tangkis	8	Kec.Pacitan	Disetiap kecamatan memiliki lebih dari 1 lap. bulu tangkis yang dikelola oleh pribadi atau organisasi
6.	Lapangan Volly Pantai	4	Kec.Pacitan	
7.	Arena Motor Cros dan Balap Kuda	1	Kec Pacitan	
8.	Futsal	1	Kec.Pacitan	
9.	Kolam Renang	1	Kec.Pacitan	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pacitan

1.2.4 ASPEK INFRASTRUKTUR WILAYAH

Kondisi geomorfologi Kabupaten Pacitan yang berbukit dan bergunung menyebabkan pembangunan sarana perhubungan jalan dan jembatan belum memadai. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan di wilayah perdesaan mengalami hambatan. Panjang jalan nasional, provinsi, kabupaten dan poros desa dapat dideskripsikan sebagaimana tabel 1.9 berikut ini :

Tabel 1.9
Panjang Jalan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012

NO	STATUS JALAN	PANJANG JALAN (M)						
		TH. 2006	TH. 2007	TH. 2008	TH. 2009	TH. 2010	TH. 2011	TH. 2012
1	Jalan Nasional	129.196	129.196	129.196	129.196	129.196	129.196	129.196
2	Jalan Provinsi	97.265	87.265	97.265	97.265	97.265	97.265	97.265
3	Jalan Kabupaten	604.127	798.000	798.000	793.000	798.000	798.000	798.000
	• Aspal	657.647	708.115	715.555	710.691	709.045	710.573	712.101
	• Makadam	46.280	81.030	74.090	80.014	83.042	82.353	81.663
	• Tanah	-	8.855	8.355	7.295	5.913	5.074	4.236
4	Jalan Poros Desa	421.600	227.927	227.927	229.317	229.317	229.317	636.699
	• Aspal	129.450	107.470	125.988	137.146	137.146	137.146	150.271
	• Makadam	256.000	84.107	68.281	57.122	57.122	57.122	321.027
	• Tanah	36.350	36.350	35.050	35.050	35.050	35.050	165.401

Sumber : UPT Dinas Bina Marga Provinsi Dan Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Pacitan

Dari aspek jaringan angkutan transportasi di Kabupaten Pacitan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu transportasi dalam kota dan antar kota. Untuk transportasi dalam kota selain kendaraan pribadi, tersedia juga angkutan umum bermotor antara lain minibus dan ojek (roda dua) serta angkutan tidak bermotor (becak dan dokar). Untuk transportasi antar kota tersedia angkutan umum antara lain bus dan minibus. Dari keseluruhan aspek pelayanan transportasi di Kabupaten Pacitan, hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan telah terjangkau pelayanan angkutan umum roda (4) empat. Sedang pada kawasan perdesaan yang jauh dari jaringan angkutan umum masih dilayani oleh ojek (roda dua).

Kedepan, dengan dibangunnya jalur transportasi lintas selatan Jawa akan memiliki posisi strategis sebagai kota penghubung antar kota, antara lain Kabupaten Trenggalek – Kabupaten Wonogiri – Kabupaten Gunung Kidul. Pada Tahun 2010 sudah dimulai pembangunan terminal Tipe A yang akan digunakan sebagai terminal

antar kota dan disincrgikan dengan pembangunan jaringan Jalur Lintas Selatan (JLS) pulau jawa sehingga dapat membuka akses dari maupun ke Kabupaten Pacitan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan transportasi selain kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, juga belum terbentuknya sistem jaringan dan model transportasi yang efisien, dimana masih terdapat percampuran pelayanan transportasi regional dengan pelayanan transportasi kota serta belum adanya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan antara pusat - pusat pelayanan fasilitas transportasi yang mendukung bagi pengembangan perekonomian daerah. Ditinjau dari data jumlah kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan orang dan barang maka dapat dilihat sebagaimana tabel 1.10 berikut ini :

Tabel 1.10
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pacitan 2009 s.d. 2012

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TAHUN 2012		
		PRIBADI	UMUM	DINAS	PRIBADI	UMUM	DINAS	PRIBADI	UMUM	DINAS	PRIBADI	UMUM	DINAS
1	Sedan	122	0	4	134	0	4	229	0	3	293	0	4
2	Jeep	72	0	4	81	0	2	125	0	4	156	0	4
3	Station	1.323	102	135	1.379	103	156	2.113	103	163	2.717	103	199
4	Bus	291	400	4	285	487	5	268	487	8	284	487	9
9	Truk	2.006	941	18	2.120	951	24	2.147	951	41	2.948	951	46
6	Sepeda Motor	45.478	0	1.123	51.604	0	1.168	77.061	0	1.352	91.005	0	1.489
JUMLAH		49.292	1.643	1.288	68.603	1.841	1.259	81.943	1.641	1.671	87.603	1.541	1.751

Sumber : Pacitan Dalam Angka 2013

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan sebagaimana tabel 1.11 berikut ini :

Tabel 1.11
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Tabuo 2009 s.d. 2012 Kabupaten Pacitan

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan (m)	1.024.461	1.024.461	1.024.461	1.024.461
2.	Jumlah Kendaraan	52.023	58.503	85.055	100.695
3.	Rasio	19,69	17,51	12,04	10,17

Sumber : Pacitan Dalam Angka 2013 Diolah

Di bidang prasarana permukiman terus mengalami peningkatan walaupun kondisi saat ini relatif belum memadai. Cakupan pelayanan prasarana air bersih, tiap tahun mengalami peningkatan termasuk juga jumlah desa yang terlayani. Pada Tahun dasar 2010, dari 171 desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan sejumlah 110 desa sudah terlayani air bersih atau sebesar 64,33%. Sampai dengan realisasi Tahun 2012, desa/kelurahan yang sudah terlayani air bersih mencapai 118 desa, atau 74,55%. Untuk rumah tangga pengguna air bersih meningkat rata-rata 5% tiap tahunnya. Jaringan perpipaan di wilayah yang dulu merupakan daerah rawan air bersih kini juga sudah dapat menikmati air bersih dengan penambahan jaringan pipa ke wilayah yang terpencil. Keberhasilan pembangunan di bidang prasarana permukiman dapat dilihat pada tabel 1.12 dibawah ini :

Tabel 1.12
Kondisi Cakupan Air Bersih Di Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Penduduk Terlayani Air Bersih (Jiwa)	296.521	310.113	326.976	345.856	352.816	360.520	380.415
	%	53,80	55,85	58,70	61,91	65,23	69,31	74,55
2	Desa Terlayani Air Bersih (Desa)	101	103	106	107	110	115	118
	%	61,59	62,86	61,99	62,57	64,33	66,41	68,15
3	Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih (RT)	83.412	87.356	92.308	97.823	103.722	108.660	112.110
4	Perpipaan (Meter)	102.202	126.767	157.512,3	170.659,3	177.522,3	184.175	190.848

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan dan PDAM Kabupaten Pacitan

Sedangkan dalam rangka pengendalian dan penetapan pengembangan kawasan, Kabupaten Pacitan telah menyusun dokumen lata ruang baik RTRW, RUTRK-RDTRK ibu kota kecamatan maupun kawasan khusus. Dokumen RTRW Kabupaten Pacitan saat ini sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan. Berikut disajikan kondisi dokumen tata ruang di Kabupaten Pacitan :

Tabel 1.13
Kondisi Dokumen Tata Ruang Di Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Dokumen RDTR Kota	-	-	3	4	4	4	4
2	Masterplan Kawasan Khusus	-	2	3	3	4	4	4
3	Perda Rencana Tata Ruang	-	-	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan dan BAPPEDA Kabupaten Pacitan

Di bidang lingkungan permukiman Kabupaten Pacitan selama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah rumah layak huni maupun rumah bersanitasi yang didukung dengan peningkatan kondisi jalan lingkungan. Sementara, luasan lingkungan permukiman kumuh mengalami penurunan rata-rata 10 ha per tahun. Berikut disajikan perkembangan kondisi permukiman di Kabupaten Pacitan sebagaimana disajikan dalam tabel 1.14 berikut ini :

Tabel 1.14
Perkembangan Kondisi Permukiman Di Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rumah Layak Huni	97.171	101.352	105.870	111.301	117.698	120.052	126.012
2	Rumah Bersanitasi	85.638	89.347	92.632	97.307	102.258	106.169	107.413
3	Jalan Lingk Yang Dibangun	1.296.786	1.302.393	1.332.664	1.344.381	1.368.885	1.375.885	1.506.632
4	Luasan Lingk Perumahan Kumuh	169	159	149,13	138,99	107 24	107 24	93,39

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

Secara umum pelayanan kebersihan di Kabupaten Pacitan belum optimal, hal ini disebabkan oleh bertambahnya volume sampah yang tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur persampahan. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kebersihan, maka dalam perencanaan kedepan diperlukan proyeksi antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan infrastruktur. Berikut disajikan data kondisi kebersihan di Kabupaten Pacitan :

Tabel 1.15
Perkembangan Kondisi Kebersihan Di Kabupaten Pacitan

NO	URAIAN	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Daerah Layanan Kebersihan (Ha)	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
2	Luas Hutan Kota (Ha)	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Sampah Terangkut Ke TPA (m ³ /hari)	106	107	108,15	110,6	111,04	111,04	111,09
4	Keluargamemiliki Jamban (KK)	75.209	94.895	105.294	105.446	105.974	113.428	118.913
5	Jalur Hijau Yang Tertata (M ²)	6.542	6.642	8.828	10.324	20.586	21.286	21.491
6	Luas Taman (M ²)	14.591,94	14.622,39	15.222,39	15.222,9	35.420	35.920	36.022
7	Penanganan Sampah	70,00	74,00	81,49	86,4	86,83	87,50	68,00
8	Days Tampung TPS	82,70	106,70	147,00	130,68	139,20	135,20	139,20

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Pengelolaan persampahan semakin kompleks dan perlu penanganan, mulai dari sumber sampah (rumah tangga, pasar, pusat perdagangan, dan industri) sampai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat, dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan serta Kantor Lingkungan Hidup. Jumlah sarana prasarana persampahan dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel 1.16 berikut ini :

Tabel 1.16
Jumlah Sarana Dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012

NO	URAIAN	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	TPA (Buah)	1	1	1	1	1	1	1
2	Tempat Sampah Permanent (Buah)	10	10	10	7	6	6	7
3	Armroll Truck (Buah)	3	3	3	3	3	3	3
4	Truck Sampah (Buah)	2	2	2	2	2	2	2
5	Conlainer (Buah)	14	14	15	16	17	21	25
6	Gerobak Sampah (Buah)	60	60	79	106	126	126	136
7	Mobil Tangga	1	1	1	1	1	1	1
8	Kendaraan Roda Tiga	2	3	3	6	6	9	9
9	Truck Tangki	1	1	1	2	2	2	4
10	Mobil Pick Up	2	2	2	2	3	2	2
11	Diesel Air	3	3	3	2	2	5	5
12	Mesin Pemotong Rumput Dorong	5	5	6	8	8	8	8
13	Mesin Pemotong Rumput Gendong	5	5	6	9	9	9	9

Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

Perkembangan kelistrikan di Kabupaten Pacitan selama 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan, mulai dari komponen sarana prasarana listrik baik distribusi JTM, JTR, GRD maupun Gardu Induk sampai dengan jumlah sambungan rumah. Perkembangan jaringan listrik dari Tahun 2006 s.d. 2012 dapat disajikan sebagaimana tabel 1.17 berikut ini :

Tabel 1.17
Perkembangan Jaringan Listrik
Kabupaten Pacitan Tahun 2006 s.d. 2012

NO	URAIAN	TAHUN						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Desa/Kel. Berlistrik	164	164	171	171	171	171	171
2	Distribusi JTM	563,03	724.782	724.782	727.030	732.699	737.634	759.422
3	Distribusi JTR	848,049	1.378.951	1.382.395	1.403.202	1.417.500	1.431.941	1.478.330
4	GRD	574	588	588	593	614	626	655
3	Transmisi	124	124	124	124	124	124	124
6	Gardu Induk	1	2	2	2	2	2	2
7	Sambungan Rumah	67.211	73.701	74.041	78.065	82.613	84.067	94.302
8	PLTS dan PLTD	-	-	84	93	597	597	597

Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan telah dialiri listrik. Namun demikian, ada beberapa wilayah dusun yang belum mendapatkan sambungan listrik PLN, sehingga dilayani melalui pengembangan energi alternatif yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Teknologi informasi di Kabupaten Pacitan mengalami perkembangan yang semakin pesat Hal ini didukung dengan adanya teknologi telekomunikasi seluler dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan sudah terlayani oleh berbagai operator seluler. Hal ini memicu pembangunan tower yang semakin banyak, sehingga Pemerintah Kabupaten Pacitan menyiapkan sistem penataan tower dengan Sistem Menara Bersama untuk mencakup semua *coverage* wilayah Kabupaten Pacitan serta meminimalisir jumlah Tower. Disisi lain dari meningkatnya perkembangan telekomunikasi seluler menyebabkan jumlah usaha wartel mengalami penurunan pelanggan dan bahkan mulai Tahun 2010 sudah tidak ada lagi, meskipun untuk Satuan Sambungan Telepon (SST) masih memiliki cukup banyak pelanggan. Berikut ini disajikan data SST dan wartel di Kabupaten Pacitan sebagai mana pada tabel 1.18 berikut ini :

Tabel 1.18
Banyaknya Satuan Sambungan Telepon (SST) Dan Wartel
Tahun 2006 s.d. 2012

No	Jenis Tarif	Tahun						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SST	8.385	8.538	7.762	7.681	9.060	9.883	8.974
2	Wartel	175	119	72	65	-	-	-
Jumlah		8.560	8.657	7.834	7.746	9.060	9.883	8.974

Sumber : Kabupaten Pacitan Dalam Angka Diolah

Fasilitas bank diukur dengan jenis dan jumlah bank beserta cabang-cabangnya, sementara untuk non bank diukur dengan jenis dan jumlah perusahaan asuransi beserta cabang-cabangnya. Fasilitas bank yang ada di Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2012 berjumlah 46 bank terdiri dari 2 bank setingkat kantor pusat, 6 bank setingkat kantor cabang, 10 bank setingkat kantor cabang pembantu dan 28 bank setingkat kantor kas. Sedangkan untuk asuransi di Kabupaten Pacitan hanya ada 4, yaitu Asuransi Jiwasraya, Asuransi Bumi Putera, Prudential dan Koperasi Asuransi Indonesia.

Sedangkan untuk fasilitas penginapan dan tempat makan di Kabupaten Pacitan dapat dilihat sebagaimana pada tabel 1.19 berikut ini :

Tabel 1.19
Jenis, Kelas, Jumlah Hotel Dan Restoran
Di Kabupaten Pacitan Tahun 2007 s.d. 2012

No	Jenis Hotel/Restoran	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Hotel	11	11	12	13	16	17
1.1	Melati I	3	3	3	4	4	5
1.2	Melati II	4	4	4	4	5	5
1.3	Melati III	4	4	5	5	7	7
2	Tempat Makan	248	249	250	259	247	335
2.1	Restoran	8	7	7	8	10	50
2.2	Warung Makan / Pedagang Kaki Lima	240	242	243	251	237	285

Sumber : DPPKA Kabupaten Pacitan

1.2.5 ASPEK SPASIAL

Dalam rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan 2009-2028, kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan system perkotaan, perdesaan dan jaringan prasarana wilayah;
- b. Pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya;
- c. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pengembangan kawasan pariwisata dan agropolitan;
- e. Pengembangan kawasan PLTU yang memanfaatkan sumber alam yang tersedia serta mengembangkan kegiatan-kegiatan didalamnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Pacitan dibagi dari beberapa sudut kepentingan yakni : sosial budaya, pertumbuhan ekonomi, teknologi tinggi dan daya dukung lingkungan. Kawasan strategis sosio-kultural dikembangkan dalam bentuk kawasan pariwisata, meliputi :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) A dengan obyek wisata yang dikembangkan adalah pantai Srau, Pantai Klayar, Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder, Pantai Nampu, Pantai Watukarung, Makam Keturunan Raja, Bekas Kerajaan Wirati dan Makam Kiyai Santri, Makam Kiyai Banteng, Situs Bak Soko, Song Agung dan Sing Terus, Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Putri, Goa Kalak, Goa Kendil, Luweng Jaran, Luweng Ombo dan wana wisata;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) B dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Teleng Ria, Pantai Tamperan, Palangan Tumpak Rinjing, Makam Kanjeng Jimat, Sumber Air Hangat, Pondok Tremas dan Makam Ki Ageng Petung dan Notopuro;

- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) C dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Tawang, Pantai Bakung, Pantai Wawaran, Pantai Jetak, Pantai Bawur, Pantai Sidomulyo, Pantai Taman, Pantai Soge, Gunung Limo, Batu Tulis dan Makam Sutononggo, Goa Somopuro, Goa Papingan, Goa Pentung, Goa Kambil, Petilasan Buwono Keling, Geger Gunung Selurung, Markas Jendral Sudirman, dan Makam Kanjeng Bayat;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) D dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Monumen Jendral Sudirman, Makam Eyang Putri dan Iro Kombor serta Makam Mbah Wager, agrowisata.

Kawasan strategis ekonomi dikembangkan dalam bentuk kawasan agropolitan yang meliputi : a) Kecamatan Nawangan dan b) Kecamatan Bandar. Rencana pengelolaan kawasan strategis agropolitan, meliputi :

- a. Penyiapan Master Plan Kawasan Agropolitan termasuk didalamnya rencana-rencana prasarana dan sarana;
- b. Percepatan pengembangan infrastruktur, terutama di Desa Jeruk Kecamatan Bandar sebagai pusat kawasan agropolitan, yang dilakukan dengan membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
- c. Pendampingan Pelaksanaan Program; dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan;
- d. Mendorong terwujudnya keterpaduan program dalam pengembangan agropolitan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah;
- e. Mendorong kemitraan antar wilayah dan antar stakeholder agar terjadi sinergi optimal;
- f. Mendorong terciptanya community driven planning yang mengedepankan keunggulan lokal, tetapi dalam wadah NKRI;
- g. Mendorong terwujudnya pola dan struktur ruang yang mendukung perwujudan agropolitan.

Kawasan strategis teknologi tinggi dikembangkan dalam bentuk pengembangan kawasan PLTU, rencana pengelolaan kawasan strategis teknologi tinggi, meliputi :

- a. Memanfaatkan sumber alam yang tersedia serta mengembangkan kegiatan yang diberikan pada kehidupan, memanfaatkan lapangan kerja bagi penduduk dalam rangka pencapaian sifat kota "self:container";
- b. Meningkatkan penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang lengkap meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan peribadatan, perbelanjaan dan perdagangan serta jasa-jasa serta prasarana dan sarana transportasi untuk merangsang perkembangan wilayah;
- c. Meningkatkan sarana-sarana utilitas seperti air minum/air bersih, listrik, sanitasi dan lain-lain;
- d. Menciptakan kondisi/bentuk lingkungan yang baik ditinjau dari komposisi, efisiensi penggunaan, keindahan dan kesesuaian, dengan penyebaran penduduk dan fasilitas/pelayanan yang merata.

1.2.6 ASPEK KELEMBAGAAN

Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka di Kabupaten Pacitan telah terjadi pengembangan wilayah terutama di desa yang mana terjadi pemekaran desa berjumlah 7 (tujuh) desa. Hal ini mengakibatkan perubahan wilayah administrasi Kabupaten Pacitan dari sebelumnya 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 159 Desa menjadi 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 Desa.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan, dimana terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah. Adapun urusan beserta SKPD pelaksananya dapat dilihat pada tabel 1.22 berikut ini :

Tabel 1.22

Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Pacitan
Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD PELAKSANA
WAJIB		
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Umum Daerah
3	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga Dan Pengairan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
4	Perumahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
5	Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
6	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda (Bagian Kerjasama Dan Perbatasan)
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
8	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dinas Kelautan Dan Perikanan
9	Pertanahan	Setda (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)
10	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
12	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
13	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Setda (Bagian Administrasi Kesra)
14	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
15	Koperasi Dan UKM	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
16	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
17	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
18	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
19	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pendidikan Dan Pelatihan Dinas Peadapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kecamatan
21	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
22	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Setda (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SKPD PELAKSANA
23	Statistik	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik
24	Kearsipan	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
25	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Setda (Bagian Humas Dan Protokol)
26	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
PILIHAN		
1	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
2	Kehutanan	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan Dan Energi
4	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
5	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
6	Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustriuan Dan Perdagangan
7	Industri	Dinas Koperasi, Perindustriuan Dan Perdagangan
8	Ketransmigrasian	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016

1.3 Kondisi Sistem Inovasi Kabupaten Pacitan Saat Ini

Kondisi Sistem Inovasi Kabupaten Pacitan saat ini secara umum menggambarkan bagaimana capaian atau kondisi dari setiap elemen Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) yang telah ada. Kondisi SIDA Kabupaten Pacitan saat ini digambarkan dalam tabel 1.23 sebagai berikut :

Tabel 1.23
Kondisi Saat Ini SIDA Kabupaten Pacitan

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2014)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pilar 1 : Penguatan Sistem Inovasi Daerah	<p>Elemen 1 : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis</p> <p>Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>a) Dokumen RPJPD dan RPJMD belum memasukkan sistem Inovasi sebagai program pembangunan;</p> <p>b) Basis data / indikator penting inovasi belum ada dan sulit diakses;</p> <p>c) Lembaga pendidikan menengah kejuruan unggulan dan pendidikan tinggi yang berkualitas belum optimal;</p> <p>d) Sistem perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan kompetitif belum optimal;</p> <p>e) Ruang publik kreatif (RPK) sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas warga interaksi antar masyarakat dan memenuhi ruang terbuka hijau belum optimal.</p> <p>a) Kelembagaan penguatan sistem inovasi belum berfungsi;</p> <p>b) SDM iptekin masih lemah;</p>

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Kondisi Saat Ini (2014)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a) Rantai nilai di kluster industri agromina dan pariwisata belum kuat.	
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	a) Aktivitas kluster industri agromina dan pariwisata belum berwawasan lingkungan; b) Aktivitas kluster industri agromina dan pariwisata belum berstandar internasional.	
3	Pilar 3 : Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 1 : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a) Kawasan khusus berbasis iptekin belum tersedia; b) Instrumen legal penetapan kawasan khusus berbasis iptekin belum disusun;	
		Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Pusat litbangyasa belum tersedia; b) Perguruan Tinggi di kawasan khusus berbasis iptekin belum tersedia; c) Industri pengguna iptekin di kawasan khusus berbasis iptekin belum ada.	
		Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Lembaga pengelola kawasan khusus berbasis iptekin belum terbentuk; b) Pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i> belum ada.	
		Elemen 4 : Budaya inovasi	Budaya berjejaring antara aktor inovasi belum berkembang	
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a) Keterkaitan antar kawasan khusus berbasis iptekin dengan <i>telecenter</i> atau BLC belum terbangun; b) Sinergitas antara kawasan khusus berbasis iptekin dengan pusat unggulan di daerah lain belum ada.	
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	Produk kawasan khusus berbasis iptekin belum memiliki standar nasional dan internasional.	
4	Pilar 4 : Penguatan Teknopreneur	Elemen 1 : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Skema pembiayaan dari pemerintah daerah bagi pengembangan bisnis inovatif belum tersedia.	
		Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Kelembagaan pusat inovasi belum terbentuk; b) Kapasitas absorpsi iptekin UMKM masih rendah; c) Inisiatif bertvirausaha berbasis iptekin dari kalangan pemuda masih rendah.	
		Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Jumlah UKM inovatif masih rendah; b) Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM belum berkembang.	
		Elemen 4 : Budaya inovasi	Budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan pendidikan tinggi belum berkembang.	

4. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan;
5. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
6. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.

Misi keempat, yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Potensi Unggulan, merupakan Misi yang perlu diwamai dengan penguatan sistem inovasi untuk percepatan pencapaian pembangunan Kabupaten Pacitan melalui terobosan kreativitas keinovasian untuk meningkatkan daya saing daerah. Melalui peningkatan daya saing dengan pendekatan penguatan sistem inovasi ini, salah satu sasaran jangka panjang Pacitan adalah terwujudnya Kabupaten Pacitan sebagai salah satu daerah yang memiliki daya saing ekonomi berbasis sumberdaya alam dan implementasi iptekin yang berkelanjutan. Upaya-upaya peningkatan daya saing yang dilakukan melalui penguatan sistem inovasi lebih mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang dilaksanakan secara bersinergi, berkolaborasi dan berkelanjutan melalui peran aktif seluruh aktor pembangunan di daerah.

Misi keempat dari RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016 memiliki tujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah Dengan Optimalisasi Potensi Wilayah. Berdasarkan tujuan tersebut disusun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah;
2. Ketersediaan pangan daerah;
3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing;
4. Pemasaran komoditas daerah;
5. Berkembangnya ekosistem kreatifitas keinovasian daerah;
6. Berkembangnya klaster industri unggulan daerah berwawasan lingkungan;
7. Terwujudnya Kawasan Teknopolitan Pacitan hijau;
8. Berkembangnya bisnis dan industri inovatif;
9. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih, energi bersih, transportasi hijau dan teknologi informasi dan komunikasi serta lingkungan yang berkualitas.

Untuk percepatan pencapaian Misi keempat RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016, diperlukan adanya tujuan lain yakni Percepatan Pencapaian Perekonomian Daerah Yang Optimal Berbasis Potensi Wilayah Melalui Penguatan Sistem Inovasi. Adapun Sasaran Strategis dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya infra dan suprastruktur dasar sistem inovasi;
2. Tumbuhnya klaster Industri berbasis potensi wilayah berwawasan lingkungan;
3. Terwujudnya pusat unggulan daerah untuk keterpaduan pengembangan dan pemanfaatan iptekin;
4. Terwujudnya percepatan pengembangan pelaku ekonomi yang berbasis iptekin;
5. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah.

Untuk menggambarkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang berkenaan dengan PSIDA, disajikan dalam tabel 1.24 berikut ini :

Tabel 1.24
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
Kabupaten Pacitan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
<p>Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan (Misi ke-4)</p>	<p>1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah</p>	<p>1. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah; 2. Berkembangnya klaster industri unggulan daerah berwawasan lingkungan; 3. Ketersediaan pangan daerah; 4. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing; 5. Pemasaran komoditas daerah.</p>
	<p>2. Percepatan pencapaian perekonomian daerah yang optimal berbasis potensi wilayah melalui penguatan sistem inovasi</p>	<p>1. Tersedianya infra dan suprastruktur dasar sistem inovasi; 2. Tumbuhnya klaster Industri berbasis potensi wilayah berwawasan lingkungan; 3. Terwujudnya kawasan khusus berbasis iptekin; 4. Terwujudnya pusat inovasi dan berkembangnya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dan UMKM inovatif daerah berbasis iptekin; 5. Terwujudnya peningkatan pemaidaan teknologi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah yakni air bersih dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</p>

BAB 2

TANTANGAN DAN PELUANG PENGUATAN SIDA

Beberapa tantangan yang menjadi permasalahan dan isu strategis pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana PEMBANGUNAN Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dinyatakan sebagai berikut :

- a. Penanganan kemiskinan;
- b. Pengelolaan sumber daya alam;
- c. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- d. Akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan publik;
- e. Peningkatan infrastruktur dasar;
- f. Akses masyarakat terhadap air bersih; dan
- g. Penanganan kawasan rawan bencana.

Permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Pacitan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (KEKEPAN) yang dihadapi Kabupaten Pacitan.

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional dan regional serta sumber-sumber lain yang dapat berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan. Isu-isu strategis yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan, meliputi :

1. Isu Internasional

Isu strategis internasional yang perlu mendapat perhatian yang berdampak bagi pengembangan dan pembangunan Kabupaten Pacitan dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain Komitmen *Millenium Development Goals* (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit Tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Pemerintah Indonesia, maka Kabupaten Pacitan wajib menindaklanjuti indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir Tahun 2015 untuk setiap tujuan pembangunan millenium tersebut. Capaian-capaian penting itu menyangkut tujuan pembangunan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, peningkatan persamaan gender dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*). Di samping itu isu strategis internasional yang juga perlu mendapat perhatian adalah “*Water, and Sanitation and green living*”.

3. Isu Strategis Kabupaten Pacitan

Selain beberapa isu-isu strategis yang telah dikemukakan di atas, sebagai aspek eksternal (internasional, nasional dan regional) yang mempengaruhi Kabupaten Pacitan, terdapat juga beberapa isu strategis yang berasal dari wilayah Kabupaten Pacitan, meliputi :

a. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam

Lahan kritis di Kabupaten Pacitan pada Tahun 2012 mencapai 21.207 Ha dari luas wilayah. Kondisi ini bila tidak dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan arealnya akan bertambah. Berdasarkan fungsi kawasan di Kabupaten Pacitan yang terbagi atas 2 (dua) kawasan yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan lahan kering, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perindustrian, kawasan pertambangan, kawasan khusus, kawasan prioritas. Sedangkan kawasan lindung yang meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan lindung yang senantiasa dikawal dengan kegiatan yang diarahkan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam tidak memsak keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

b. Masih Rendahnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan

Berdasarkan teori ekonomi, salah satu sumberdaya pembangunan yang sangat penting adalah sumber daya manusia (SDM). Sebagai salah satu faktor produksi, kualitas SDM akan sangat mempengaruhi output/produksi suatu perekonomian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. PBB sudah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang salah satunya adalah semangat untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak serta peningkatan daya beli. Komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan diwujudkan dengan penerapan kebijakan di bawah ini :

- a) Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan;
- b) Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
- c) Peningkatan cakupan pembiayaan jaminan sosial nasional, kesehatan dan ketenagakerjaan.

c. Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Publik

Sampai saat ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang kurang dapat diakses, prosedur yang panjang, biaya yang tidak jelas, merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pacitan. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan optimal oleh rakyat. Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunaannya. Masyarakat yang seharusnya menjadi pengontrol pemerintah, belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Pemahaman masyarakat terhadap UU Pelayanan Publik dinilai masih minim. Dengan demikian reformasi birokrasi dan pelayanan publik tetap diperlukan agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan, paradigma dan kemajuan teknologi.

d Optimalisasi Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan

Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditandai dengan pendanaan pembangunan Kabupaten Pacitan masih mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Diharapkan ke depan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya serta mampu meningkatkan pengelolaan sumber daya wilayah yang dimiliki untuk mendatangkan pemasukan bagi daerah. Dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan pembangunan lainnya, disadari bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat membebani masyarakat dan dunia usaha dengan retribusi dan pajak yang terlalu memberatkan. Perlu strategi dan arah kebijakan peningkatan PAD yang lebih efektif.

e. Masih Kurang Memadainya Kondisi Infrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah. Kondisi peningkatan prasarana jalan di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2006 s.d 2010 cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan panjang jalan per tahun. Selama tahun 2006 s.d 2007 peningkatan panjang jalan Kabupaten berkisar antara 32,1%, pada tahun 2008 s.d 2012 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun demikian kondisi jalan tersebut semakin menunjukkan penurunan. Peningkatan panjang jalan tidak diimbangi dengan peningkatan kondisi jalan yang ada. Selama Tahun 2006 s.d 2010 kondisi jalan sedang dan rusak berat bertambah. Hal ini harus segera diantisipasi agar tidak sampai mengganggu kelancaran distribusi barang jasa dan faktor-faktor produksi. Pada realisasi Tahun 2011 dan 2012, panjang jalan masih sama dengan tahun dasar 2010, akan tetapi kondisi jalan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

f. Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih

Kekeringan yang melanda di wilayah sebagian Kabupaten Pacitan sebenarnya bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Artinya jauh-jauh hari keadaan itu bisa diprediksi. Keseimbangan air yang membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan air tidak mencukupi atau tidakimbang. Kebutuhan air untuk rumah tangga, industri dan pertanian semakin hari semakin meningkat seiring pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas perekonomian. Mau tidak mau, penanganan Kabupaten Pacitan yang telah mengalami krisis penyediaan air minum atau air bersih melalui intervensi infrastruktur dan kegiatan terkait harus mendapat prioritas.

g. Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam

Kabupaten Pacitan terletak di Provinsi Jawa Timur diantara $110^{\circ} 56'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 55'$ - $08^{\circ} 17'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.389,87 Km² atau 138,987,16 Ha. Dari luasan wilayah tersebut sebagian besar berupa bukit, gunung dan jurang terjal dan termasuk jajaran pegunungan seribu (*Ring of Fire*). Secara administratif Kabupaten Pacitan terbagi dalam 12 wilayah Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 Desa.

Bencana alam merupakan kejadian luar biasa yang sulit untuk diprediksi. Namun demikian sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan penanganan dan penanggulangan pra dan pasca bencana. Kabupaten Pacitan yang tergolong sebagai kawasan rawan bencana terbagi atas 4 (empat) jenis kawasan, yaitu :

terjadinya banjir adalah dengan meningkatkan luasan ruang hutan kota dan kawasan terbuka hijau, terutama di daerah hulu, guna meningkatkan penyerapan air hujan kedalam tanah dan meminimalkan air limpasan (*run off*), serta dengan melakukan pengembangan sistem prasarana drainase. Pemerintah Kabupaten Pacitan belum mempunyai standar penanganan bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Agar penanganan bencana dapat lebih efektif, maka perlu dibuat suatu standar penanganan bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

e) Kekeringan

Berdasarkan peta bahaya kekeringan Kabupaten Pacitan diketahui bahwa sebesar 96,41% dari total luas wilayah memiliki potensi bahaya kekeringan dalam kategori kelas tinggi. Sedangkan sebesar 3,25% dari total luas wilayah memiliki potensi bahaya kekeringan dalam kategori kelas sedang. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki potensi bahaya kekeringan dalam kategori kelas TINGGI.

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2016)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> a) Kerjasama antar daerah sekitar mulai berjalan baik bagi pembangunan daerah; b) Kerjasama antar pusat daerah mulai berjalan baik bagi pembangunan daerah.
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> a) Kesetaraan gender meningkat; b) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan mulai tinggi; c) Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masyarakat meningkat; d) Fasilitas untuk masyarakat <i>difabel</i> mulai tersedia.
2	Pilar 2 : Penguatan Klaster Industri	Elemen 1 : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> a) Kelembagaan pengelola pengembangan klaster industri sudah berfungsi; b) Landasan legal bagi pengembangan klaster industri prioritas daerah telah diterbitkan; c) Rencana induk pengembangan pariwisata daerah dan rencana induk pengembangan daya tarik wisata sudah tersusun; d) Pelaku wisata yang profesional mulai berkembang; e) Pusat informasi kepariwisataan berjalan efektif; f) Rencana induk pengembangan klaster industri agromina telah tersusun.
		Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasa (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pasokan iptekin di bidang integrasi agromina tersedia; b) Daya serap iptekin pelaku industri agromina sudah meningkat; c) Daya scrap iptekin pelaku industri agromina (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) meningkat; d) Pasokan iptekin industri pariwisata tersedia.
		Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Interaksi antara para pemangku kepentingan di industri agromina dengan pemasok iptekin mulai berjalan baik; b) Interaksi antara para pemangku kepentingan di industri pariwisata dengan pemasok iptekin mulai berjalan.
		Elemen 4 : Budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Budaya inovasi di industri agromina berkembang; b) Budaya inovasi di industri pariwisata berkembang.
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Rantai nilai di klaster industri agromina dan pariwisata mulai kuat.
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	a) Aktivitas klaster industri agromina dan pariwisata telah memperhatikan lingkungan;

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai (2016)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster industri prioritas berkembang
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	a) Produk dari bisnis inovatif yang terstandar sudah ada; b) Kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif sudah terjalin.
5	Pilar 5 : Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 1 : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup air bersih, teknologi informasi dan komunikasi sudah tersedia
		Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Pasokan iptekin air bersih, teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat; b) Kapasitas absorpsi masyarakat <i>terhadap</i> iptekin air bersih, teknologi informasi dan komunikasi meningkat.
		Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Interaksi pengembangan <i>green innovation development (GID)</i> tersedia; b) Kerjasama litbangyasa air bersih, teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat.
		Elemen 4 : Budaya inovasi	Budaya GID di setiap SKPD dan masyarakat meningkat.
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Kebijakan daerah dalam pembangunan hijau (air bersih, teknologi informasi dan komunikasi) sudah selaras.
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	a) Standar pembangunan hijau infrastruktur (air bersih, teknologi informasi dan komunikasi) sudah ada; b) Kerjasama internasional dalam pembangunan hijau infrastruktur (air bersih, teknologi informasi dan komunikasi) sudah terjalin.

BAB 4

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mempercepat proses pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 melalui terobosan-terobosan inovatif. Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan adalah Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera. Makna dari Visi ini berarti mewujudkan masyarakat Pacitan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, derajat pendidikan dan daya beli masyarakat.

Untuk terwujudnya Visi Pembangunan Tahun 2011-2016, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan;
5. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
6. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.

Misi keempat di atas yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Potensi Unggulan, merupakan Misi yang perlu diwamai dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah untuk percepatan pencapaian pembangunan Kabupaten Pacitan melalui terobosan kreativitas keinovasian untuk meningkatkan daya saing daerah. Melalui peningkatan daya saing dengan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah ini, salah satu sasaran jangka panjang Kabupaten Pacitan adalah terwujudnya Kabupaten Pacitan sebagai salah satu daerah yang memiliki daya saing ekonomi berbasis sumberdaya alam dan implementasi iptekin yang berkelanjutan. Upaya-upaya peningkatan daya saing yang dilakukan melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah lebih mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang dilaksanakan secara bersinergi, berkolaborasi dan berkelanjutan melalui peran aktif seluruh aktor pembangunan di daerah.

Misi keempat dari RPJMD Kabupaten Pacitan memiliki tujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah Dengan Optimalisasi Potensi Wilayah. Untuk percepatan pencapaian Misi keempat RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016, diperlukan adanya tujuan lain yakni Percepatan Pencapaian Perekonomian Daerah Yang Optimal Berbasis Potensi Wilayah Melalui Penguatan Sistem Inovasi. Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya infra dan suprastruktur dasar sistem inovasi;
2. Tumbuhnya klaster Industri berbasis potensi wilayah berwawasan lingkungan;
3. Terwujudnya kawasan khusus berbasis iptekin;
4. Terwujudnya pusat inovasi dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) dan UMKM, inovatif daerah berbasis iptekin;

5. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah yakni air bersih, teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Tabel 4.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera			
MISI Yang Berkaitan Dengan Penguatan SIDA : Meningkatkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Potensi Unggulan (Misi Keempat)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Percepatan pencapaian perekonomian daerah yang optimal berbasis potensi wilayah melalui penguatan sistem inovasi (tujuan ke dua)	Tersedianya infra dan suprastruktur dasar sistem inovasi	Mengembangkan infra dan suprastruktur yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah	Menata dan mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal dan perizinan
			Memperkuat kelembagaan tim koordinasi penguatan SIDA dan daya dukung iptekin dari lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan iptekin strategis daerah
			Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi hasil litbangyasa
			Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan tinggi, vokasi dan menengah secara inklusif
			Memperkuat kerjasama antar daerah dan daerah dengan pusat
			Melakukan penyesuaian dengan perkembangan global terkait isu standar, HKI dan lingkungan
			Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif
	Tumbuhnya kluster Industri berbasis potensi wilayah berwawasan lingkungan	Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan kluster industri unggulan daerah	Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptekin/litbangyasa industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata
			Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi pengembangan kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata
			Meningkatkan kualitas SDM kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan SDM
			Meningkatkan rantai nilai kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dan agromina
			Mengembangkan produk kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berwawasan lingkungan dan berstandar internasional

Terwujudnya kawasan khusus berbasis iptekin	Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan kawasan khusus berbasis iptekin	Mempersiapkan berbagai kebijakan untuk pembangunan kawasan khusus berbasis iptekin
		Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan iptekin/litbangyasa di kawasan khusus berbasis iptekin
		Menumbuhkembangkan kerjasama dan jaringan inovasi di kawasan khusus berbasis iptekin
		Mendorong budaya inovasi di kawasan khusus berbasis iptekin
		Membangun jaringan kerjasama kawasan khusus berbasis iptekin dengan kawasan serupa
		Membangun jaringan dan kerjasama internasional di kawasan khusus berbasis iptekin
Terwujudnya pusat inovasi dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) dan UMKM inovatif daerah berbasis iptekin	Mendorong perkembangan usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	Mengembangkan skema pembiayaan bagi teknopreneur
		Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru
		Mengembangkan interaksi antara penghasil iptekin dengan UMKM dan teknopreneur baru
		Membangun budaya inovasi di kalangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan dan pemuda
		Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif
		Membangun kerjasama internasional untuk pengembangan teknopreneur
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah yakni air bersih, teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakni energy, air bersih, TIK, transportasi, dan lingkungan	Mengembangkan kerangka umum terkait dokumen rencana induk dan regulasi untuk pengembangan inovasi hijau dalam menangani masalah air bersih dan TIK
		Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga iptekin dalam menangani masalah air bersih dan TIK
		Meningkatkan Interaksi antara lembaga Iptekin dengan masyarakat dalam menangani masalah air bersih dan TIK
		Membangun budaya inovasi bersih di masyarakat dan pemerintah daerah
		Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan kebijakan sistem inovasi dalam menangani masalah air bersih dan TIK

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Tersedia program studi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata pada Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan belum dilengkapi program studi : pertanian, perikanan dan pariwisata	Terpenuhinya Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang dilengkapi program studi perumahan, perikanan dan pariwisata	Pengembangan program studi pertanian, perikanan dan pariwisata pada Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Pendidikan	Akademi Komunitas Negeri Pacitan
			Optimalisasi pemanfaatan ruang publik kreatif secara terstruktur	Belum optimalnya penggunaan ruang publik untuk kreativitas masyarakat	Terbangunnya ruang publik kreatif (RPK) sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas warga interaksi antar masyarakat dan memenuhi ruang terbuka hijau	Pengembangan infastruktur ruang publik kreatif	Percencanaan tata ruang	Dinas CKTRK, Dinas Budparpora, Kanter Lingkungan Hidup
			Investasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) 1% dari APBD	Investasi iptekin belum mencapai 1% dari APBD	Meningkanya investasi iptekdn minimal 1% dari APBD	Peningkatan investasi iptekin	Kelitbangan	Balitbangtik
		Memperkuat kelembagaan tim koordinasi penguatan SIDA dan daya dukung iptekin dari lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan iptekin strategis daerah	Rapat tim koordinasi minimal 1 kali setahun dan rapal pokja minimal 2 kali setahun	Belum optimalnya kinerja kelembagaan iptekin/Penguatan SIDA	Berfungsinya kelembagaan iptekin/Penguatan SIDA	Pengembangan kelembagaan iptekin/Penguatan SIDA	Kelitbangan (Penguatan SIDA)	Balitbangtik
			Jumlah SDM Iptekin	Daya scrap dan kualitas SDM iptekin masih lemah	Daya scrap dan kualitas SDM iptekin meningkat	Pengembangan pendidikan dan pelatihan iptekin	Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arab Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Memmbuhkan bangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningt atkan difusi inovasi basil litbangyasa	Jumlah sosialisasi PSIDA	Pemahaman mengenai PSIDA masih belum optimal	Kaidah-kaidab PSIDA sudah tersosialisasi di seluruh aktor di daerah	Sosialisasi PSIDA	kelitbangan	Balitbangtik
			Jumlah anggota/pelatihan /sosialisasi dll	Belum optimalnya peran posyantek dan wartek	Berperannya posyantek dan wartek dalam mendifusikan iptekin dan hasil litbangyasa	Revitalisasi posyantek dan wartek	Pembinaan teknologi tepat guna	Bapemas dan Pemdes, Balitbangtik
		Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan tinggi, vokasi dan menengah secara inklusif	Jumlah rma-rata peserta apresiasi/tahun	Belum adanya kegiatan apresiasi inovatif daerah	Berjalannya apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif	Lomba inotek	kelitbangan	Balitbangtik
		Memperkuat kerjasama antar daerah dan daerah dengan pusat	Jumlah kerjasama antar daerah	Kerjasama antara daerah di bidang ekonomi belum ada	Bertambahnya kerjasama bidang ekonomi	Pengembangan kerjasama bidang ekonomi	Fasilitasi kerjasama antar daerah	Bagian Kerjasama dan Perbatasan Setda
			Jumlah kerjasama dengan lembaga pusat	Masih rendahnya jumlah kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Berjalannya secara optimal kerjasama antar pusat daerah bagi pembangunan daerah di bidang ekonomi	Pengembangan kerjasama pusat dan daerah di bidang ekonomi	Fasilitasi kerjasama antar daerah	Bagian Kerjasama dan Perbatasan Setda
		Melakukan penyelarasan dengan perkembangan global terkait isu standar, HKI dan lingkungan	Diperolehnya penghargaan lingkungan	Belum optimalnya peran masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam menjaga lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan	Peningkatan kepedulian masyarakat tentang lingkungan hidup	Pengambangan kinerja pengelolaan persampahan, Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Kantor Lingkungan Hidup

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arab Kebijakan	Indikator IGnerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah HKI/Paten	Masih rendahnya kesadaran HKI di masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang HKI	Peningkatan kesadaran HKI	Fasilitasi HKI	Dinas Koperindag, Balitbangtik
			Tersedia fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i>	Masih kurangnya fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i>	Tersedianya fasilitas untuk masyarakat <i>difabel</i> di ruang publik dan kantor pemerintah	Peningkatan fasilitas <i>difabel</i>	Inisiasi fasilitas <i>difabel</i>	Dinas Pendidikan, Dinas Sosnakertrans
2	Tumbuhnya klaster industri berbasis potensi wilayah berwawasan lingkungan	Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah						
		Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif	Tersedia kebijakan dan infrastruktur klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 1. Perbup pengembangan klaster industri prioritas daerah 2. Tata laksana pengembangan klaster 3. Dokumen rencana induk	1. Belum tersedia kebijakan dan infrastruktur klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 2. Belum tersedianya rencana induk klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	1. Terbitnya Peraturan Bupati bagi pengembangan klaster industri prioritas daerah 2. Berfungsinya kelembagaan pengelola pengembangan klaster industri 3. Tersusunnya rencana induk pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	1. Pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 2. Penyusunan rencana induk klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda, Dinas TPP, Dinas KP, Dinas Budparpora, Dinas Koperindag

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arab Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1. Prosentase jalan yang baik 2. Jumlah hotel 3. Jumlah sarana yang tersertifikasi 4. Jumlah pusat informasi	1. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan standar pelayanan pariwisata	1. Meningkatnya akses jalan darat dan sarana angkutan menuju destinasi wisata pantai, goa dan peninggalan sejarah 2. Tersedianya sarana dan fasilitas akomodasi wisata yang memenuhi standar fasilitas wisata domestik dan internasional 3. Tersedianya sarana kuliner, kesehatan dan penunjang yang sesuai standar 4. Tersedianya pusat informasi dan layanan kepariwisataan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan pariwisata	1. Pengembangan pemasaran, destinasi dan kemitraan 2. Pengembangan jalan dan jembatan - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Pembangunan infrastruktur menuju destinasi wisata	Dinas Budparpora, Dinas BMP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, Dinas Hubkominfo, Bagian PDE Setda
			Jumlah operator (pelaku wisata)	Belum berkembangnya pelaku wisata	Tersedia dan berkembangnya pelaku wisata pantai, goa dan peninggalan sejarah yang handal dan profesional	Pengembangan pelaku wisata, pengembangan jaringan kerjasama dengan agen dan biro perjalanan wisata domestik dan internasional	Pengembangan kemitraan pariwisata	Dinas Budparpora
			Jumlah klaster industri	Belum adanya klaster industri berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	Berkembangnya aktivitas perekonomian terpadu berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	Pengembangan dan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan pariwisata	Pengembangan kawasan budidaya laut dan perairan, peningkatan produksi pertanian dan pariwisata	Dinas KP, Dinas TPP, Dinas Budparpora

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arab Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptekin/litbangyasa industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	1. Jumlah lembaga layanan informasi iptekin 2. Jumlah pemanfaatan iptekin (TTG)	Terbatasnya informasi iptekin bagi klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	1. Tersedianya pasokan iptekin (on-farm dan off-farm) di bidang industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 2. Tersedianya iptekin industri pariwisata pantai, goa dan peninggalan sejarah	Pengembangan pasokan inovasi bagi klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Bimbingan teknis	Dinas KP, Dinas TPP, Dinas Budparpora
		Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Pertemuan rutin dalam setahun	Masih rendahnya interaksi pelaku klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Optimalisasi interaksi antara para pemangku kepentingan di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Peningkatan interaksi antar klaster industri dengan penghasil iptekin	Pengembangan kerjasama bidang ekonomi	Dinas KP, Dinas TPP, Dinas Budparpora
		Meningkatkan kualitas SDM klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan SDM	- Tersedia SDM yang profesional dalam klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata (jumlah relawan berinovasi) - Sertifikasi SDM, Manajer Pengendali Mutu (MPM) minimal 3 orang	Masih rendahnya kualitas SDM dalam budaya inovasi	1. Meningkatnya kualitas SDM dalam budaya inovasi di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 2. Berkembangnya budaya inovasi di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	1. Peningkatan kualitas SDM untuk budaya inovasi di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 2. Peningkatan budaya inovasi di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Pelatihan peningkatan kualitas SDM	Dinas KP, Dinas TPP, Dinas Budparpora

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arab Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah pertemuan	Belum adanya sinkronisasi kepentingan antara pelaku bisnis di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata	Sinkronisasi kepentingan dan hubungan kerja antara pelaku bisnis dan masyarakat sekitar	Peningkatan sinkronisasi hubungan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Rapat Koordinasi	Dinas KP, Dinas TPP, Dinas Koperindag, Dinas Budparpora
		Meningkatkan rantai nilai klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Berkembangnya rantai nilai klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Masih lemahnya rantai nilai klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Menguatnya rantai nilai di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Penguatan rantai nilai klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Pengembangan pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata	Dinas KP, Dinas TPP, Dinas Koperindag, Dinas Budparpora
		Mengembangkan produk klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berwawasan lingkungan dan berstandar internasional	Jumlah produk klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berwawasan lingkungan dan berstandar internasional	Masih belum optimalnya klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dalam pelestarian lingkungan	Aktivitas klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berwawasan lingkungan dan berstandar internasional telah memenuhi kaitah kelestarian lingkungan	Peningkatan usaha klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan	Penciptaan iklim usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Dinas Koperindag, Dinas Budparpora
			Jumlah sertifikasi	Masih belum terstandarnya pelaku klaster industri pariwisata	Aktivitas pelaku klaster industri pariwisata berstandar internasional	Peningkatan standar klaster industri pariwisata	Peningkatan pengelolaan pariwisata dan peningkatan pemasaran pariwisata	Dinas Budparpora

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Terwujudnya kawasan khusus berbasis iptekin	Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan kawasan khusus berbasis iptekin						
		Mempersiapkan berbagai kebijakan untuk pembangunan kawasan khusus berbasis iptekin	Kebijakan kawasan khusus	Belum adanya kawasan khusus berbasis iptekin	Tersedianya kebijakan pengembangan kawasan khusus berbasis iptekin	Penyusunan perizinan kawasan khusus berbasis iptekin	Perencanaan tata ruang	Bappeda, Dinas CKTRK
			Tersedianya dokumen perencanaan kawasan khusus berbasis iptekin	Belum lengkapnya dokumen perencanaan kawasan khusus berbasis iptekin	Tersusunnya rencana detail kawasan khusus berbasis iptekin	Penyusunan rencana detail perencanaan pembangunan kawasan khusus berbasis iptekin	Perencanaan tata ruang	Dinas CKTRK
		Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan iptekin/litbangyasa di kawasan khusus berbasis iptekin	Jumlah pelatihan-pelatihan iptekin	Belum dimulainya pembangunan kawasan khusus berbasis iptekin	Menguatnya kelembagaan untuk penguatan iptekin/litbangyasa	Penguatan kelembagaan iptekin/litbangyasa daerah	Perencanaan tata ruang	Dinas CKTRK
			Jumlah HKI	Masih rendahnya kesadaran perlindungan HKI	Meningkatnya jumlah HKI terdaftar (per 10.000 penduduk)	Peningkatan perlindungan HKI	Pelatihan HKI	Dinas Koperindag, Balitbangtik
		Menumbuhkembangkan kerjasama dan jaringan inovasi di kawasan khusus berbasis iptekin	Menumbuhkembangkan kerjasama dan jaringan inovasi di kawasan khusus berbasis iptekin	Belum tersedianya kelembagaan pengelola kawasan khusus berbasis iptekin	Terbentuknya lembaga pengelola kawasan khusus berbasis iptekin	Pengembangan kelembagaan pengelola kawasan khusus berbasis iptekin	Penguatan kelembagaan	Bappeda, Dinas CKTRK

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arab Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Terbentuknya pusat belajar masyarakat berupa telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)	Belum tersedianya pusat belajar masyarakat berupa telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)	Terbangunnya pusat belajar masyarakat berupa telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)	Pengembangan kawasan belajar publik	Sinkronisasi program	Dinas Hubkominfo, Bagian PDE Setda
		Mendorong budaya inovasi di kawasan khusus berbasis iptekin	Terselenggaranya forum iptekin minimal 1/thn	Delum terbangunnya jaringan iptekin di kawasan khusus	Berkembangnya budaya berjejaring antara aktor inovasi iptekin di kawasan khusus	Pengembangan jaringan iptekin di kawasan khusus	Penguatan kelembagaan iptekin	Dinas Hubkominfo, Bagian PDE Setda
		Membangun jaringan kerjasama di kawasan khusus berbasis iptekin dengan kawasan serupa	Jumlah kerjasama	Belum masuknya Pacitan sebagai kawasan khusus berbasis iptekin dan anggota asosiasi internasional	Masuknya Pacitan sebagai kawasan khusus berbasis iptekin dan anggota asosiasi internasional	Pengembangan jaringan kerjasama asosiasi nasional dan internasional	Pengembangan kerjasama	Dinas Hubkominfo, Bagian PDE Setda, Bagian KSP Setda
			Jumlah kerjasama	Belum adanya kerjasama dengan pusat unggulan nasional	Terbangunnya kerjasama dengan pusat unggulan nasional	Perencanaan kerjasama	Pengembangan kerjasama	Dinas Hubkominfo, Bagian PDE Setda, Bagian KSP Setda
		Membangun jaringan dan kerjasama internasional di kawasan khusus berbasis iptekin	Dimuainya jaringan kerjasama internasional kawasan khusus berbasis iptekin Jumlah kerjasama	Belum adanya jaringan dan kerjasama internasional kawasan khusus berbasis iptekin	Terbangunnya jaringan dan kerjasama internasional kawasan khusus berbasis iptekin	Perencanaan kerjasama	Pengembangan kerjasama	Dinas Hubkominfo, Bagian PDE Setda, Bagian KSP Setda
4	Terwujudnya pusat inovasi dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) dan UMKM inovatif daerah berbasis iptekin	Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya						
		Mengembangkan skema pembiayaan bagi teknopreneur	Lembaga pembiayaan teknopreneur	Belum ada lembaga pembiayaan teknopreneur	Tersedianya 1 lembaga pembiayaan teknopreneur	Pengembangan skema pembiayaan bagi bisnis inovatif	Inisiasi lembaga pembiayaan teknopreneur	Dinas Koperindag, PLUT

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Alas Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	Jumlah Pertemuan minimal 2 / tahun	Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	Meningkatnya fungsi dan peran kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	Pembangunan fungsi dan peran kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	Fasilitasi pendampingan UMKM dan teknopreneur baru	Dinas Koperindag, PLUT
			Jumlah pelatihan iptekin	Masih rendahnya kapasitas iptekin	Meningkatnya kapasitas absorpsi iptekin UMKM	Peningkatan kapasitas iptekin UMKM	Fasilitasi pendampingan UMKM dan teknopreneur baru	Dinas Koperindag, PLUT
			Jumlah pengusaha pemula (teknopreneur-ship)	Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda	Meningkatnya inisiatif berwirausaha berbasis iptekin dari kalangan pemuda	Peningkatan berwirausaha di kalangan pemuda	Fasilitasi pendampingan UMKM dan teknopreneur baru	Dinas Koperindag, PLUT
		Mengembangkan interaksi antara penghasil iptekin dengan UMKM dan teknopreneur baru	Minimal terjalin 1 kerjasama antara penghasil teknologi dan UMKM	Masih rendahnya kerjasama pemasok iptekin dengan UMKM	Berembangnya kerjasama antara penghasil teknologi dan UMKM;	Peningkatan kerjasama antara pemasok iptekin dengan UMKM	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Badan PMPP, Dinas Koperindag, Bagian KSP Setda
		Membangun budaya inovasi di kalangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan dan pemuda	Jumlah pengusaha pemula (teknopreneur-ship)	Masih rendahnya budaya menciptakan lapangan kerja	Berkembangnya budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Peningkatan muatan kewirausahaan pada kurikulum Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Pengembangan kurikulum	Akademi Komunitas Negeri Pacitan
		Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif	Terciptanya minimal 1 jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri prioritas	Rendahnya jenis usaha di daerah	Berkembangnya jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri prioritas	Pengembangan usaha potensial daerah	Fasilitasi pendampingan UMKM dan teknopreneur baru	Dinas Koperindag, PLUT

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Membangun kerjasama internasional untuk pengembangan teknopreneur	Jumlah produk berstandar	Masih sedikitnya produk UMKM yang terstandar	Produk dari bisnis inovatif terstandar, baik nasional maupun internasional	Peningkatan standar produk UMKM	Fasilitasi pendampingan UMKM dan teknopreneur baru	Dinas Koperindag, PLUT
			Jumlah kerjasama internasional	Masih belum terjalinnya kerjasama internasional bagi UMKM	Terjalinnya kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif	Peningkatan kerjasama internasional bagi UMKM	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Badan PMPP, Dinas Koperindag, Bagian KSP Setda
5	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah yakni air bersih, teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakni air bersih dan TIK						
		Mengembangkan kerangka umum terkait dokumen rencana induk dan regulasi untuk pengembangan inovasi hijau dalam menangani masalah air bersih dan TIK	Dokumen rencana induk	Belum optimalnya implementasi regulasi pengembangan inovasi hijau dalam menangani masalah air bersih dan TIK	Tersedianya pedoman/panduan <i>green innovation development (GID)</i> mencakup air bersih dan TIK	Penyusunan rencana induk GID	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Dinas Hubkominfo

No	Sasaran SIDA	Strategi Dan Arab Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Kegiatan	Program	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi SIDA Saat Ini	Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga iptekin dalam menangani masalah air bersih dan TIK	Tersedia sarana dan prasarana serta lembaga iptekin untuk menangani masalah air bersih dan TIK (Terbentuknya kelembagaan)	Belum terbentuk kelembagaan pengembangan GID	1. Terbangunnya kelembagaan yang menangani pengembangan Green Innovation Development (GID) 2. Meningkatnya pasokan iptekin air bersih dan TIK 3. Meningkatnya kapasitas absorpsi masyarakat terhadap iptekin air bersih dan TIK	Pengembangan kelembagaan pemasok dan pengguna iptekin untuk GID	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Hubkominfo
		Meningkatkan Interaksi antara lembaga Iptekin dengan masyarakat dalam menangani masalah air bersih dan TIK	Jumlah kerjasama	Belum terbangunnya kerjasama pengembangan GID	Meningkatnya kerjasama litbangyasa air bersih dan TIK	Pengembangan kerjasama litbangyasa GID	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Bapemas dan Pemdes, Kantor KLH
		Membangun budaya inovasi bersih di masyarakat dan pemerintah daerah		Masih rendahnya budaya GID	Meningkatnya Budaya GID	Pengembangan budaya GID	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Bapemas dan Pemdes, Kantor LH
		Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan kebijakan sistem inovasi dalam menangani masalah air bersih dan TIK	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Jumlah kegiatan bersih-bersih	Tingkat kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan budaya bersih dan GID masih rendah	Kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan budaya bersih dan GID	Sosialisasi budaya bersih dan GID	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Bapemas dan Pemdes, Kantor KLH

BAB 6

RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

Berdasarkan fokus program prioritas SIDA yang disusun di dalam Bab V, maka disusun rencana aksi berupa rincian kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun sebagaimana disajikan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1 Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan Periode 2014-2016

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akum Dicapui
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengembangkan infra dan suprastruktur yang mendukung bagi perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah						
	Menata dan mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal dan perizinan	Penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perda RPJPD dan RPJMD belum berisi PSIDA	-	-	Terbit revisi Perda RPJPD dan terbit Perda RPJMD yang berisi PSIDA	Tertatanya dokumen perencanaan pembangunan daerah mengikuti peraturan perundangan
		Optimalisasi pelayanan perizinan Satu pintu	Pelayanan perizinan belum optimal	-	Sistem perizinan terpadu yang mudah, cepat, transparan, prima dan akuntabel secara online	Sistem perizinan terpadu yang mudah, cepat, transparan, prima dan akuntabel secara online	Terbangunnya sistem perizinan terpadu yang mudah, cepat, transparan, prima dan akuntabel secara online

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Arah Kebijakan						
		Pengembangan data/informasi inovatif	Basis data/informasi inovatif yang mudah diakses, up date dan valid belum tersedia	Basis data/informasi inovatif terpejakan	Basis data/informasi inovatif mulai diintegrasikan dengan basis data daerah	Basis data/informasi inovatif terintegrasi dengan basis data daerah	Tersedianya basis data/informasi inovatif yang mudah diakses, up date dan valid
		Pengembangan program studi pertanian, perikanan dan pariwisata pada akademi komunitas	Akademi Komunitas Negeri Pacitan belum dilengkapi program studi : pertanian, perikanan dan pariwisata		Sekolah vokasi unggulan dibentuk pada tingkat Diploma	Sekolah vokasi unggulan dibentuk pada tingkat Diploma	Terpenuhinya Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang dilengkapi program studi pertanian, perikanan dan pariwisata
		Pengembangan infrastruktur ruang publik kreatif	Belum optimalnya penggunaan ruang publik untuk kreativitas masyarakat	Tersusunnya rancangan pembangunan ruang publik kreatif	Pembangunan ruang publik kreatif	Pembangunan ruang publik kreatif	Terbangunnya ruang publik kreatif (RPK) sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas warga inersksi antar masyarakat dan memenuhi ruang terbuka hijau
	Memperkuat kelembagaan tim koordinasi penguatan SIDA dan daya dukung iptekin dari lembaga litbang dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan iptekin strategis daerah	Pengembangan kelembagaan iptekin (kelitbangan)	Belum optimalnya kinerja kelembagaan iptekin (kelitbangan)	Timkor SIDA mulai melakukan koordinasi tugas dan fungsi	Laporan monev I pelaksanaan rodmap	Laporan monev II pelaksanaan rodmap	Berfungsinya kelembagaan iptekin (kelitbangan)
		Pengembangan pendidikan dan pelatihan iptekin	Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sekarang 7,2 tahun	Tersusun kurikulum diklat Iptekin	Dilaksanakan kurikulum diklat Iptekin	Dilaksanakan kurikulum diklat Iptekin	Daya serap dan kualitas SDM iptekin meningkat

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi hasil litbangyasa	Sosialisasi PSIDA	Pemahaman mengenai PSIDA masih belum optimal	Timkor PSIDA mulai melakukan penyiapan sosialisasi mengenai PSIDA	Pemahaman mengenai PSIDA mulai disosialisasikan (25%)	Pemahaman mengenai PSIDA mulai disosialisasikan (50%)	Kaidah-kaidah PSIDA sudah tersosialisasi di seluruh aktor di daerah
		Revitalisasi posyantek dan wartek	Belum optimalnya peran posyantek dan wartek	Meningkatnya peran posyantek dan wartek	Percontohan dan diseminasi iptekin oleh posyantek dan wartek	Terkelolanya peran posyantek dan wartek sebagai agen diseminasi inotek	Berperannya posyantek dan wartek dalam mendifusikan iptekin dan hasil litbangyasa
	Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan tinggi, vokasi dan menengah secara inklusif	Lomba inotek	Belum adanya kegiatan apresiasi inovatif daerah	Dilaksanakan lomba inotek	Dilaksanakan lomba inotek	Dilaksanakan lomba inotek	Berjalannya apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif
	Memperkuat kerjasama antar daerah dan daerah dengan pusat	Pengembangan kerjasama bidang ekonomi	Kerjasama antar daerah di bidang ekonomi belum ada	Penguatan SIDA sebagai bagian dari agenda kerjasama antar daerah	Berjalannya Penguatan SIDA sebagai bagian dari agenda kerjasama antar daerah	Meningkatnya Penguatan SIDA sebagai bagian dari agenda kerjasama antar daerah	Bertambahnya kerjasama bidang ekonomi
		Pengembangan kerjasama pusat dan daerah di bidang ekonomi	Masih rendahnya jumlah kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Peta kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Rintisan kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Meningkatnya jumlah kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Berjalannya secara optimal kerjasama antar pusat daerah masih bagi pembangunan daerah di bidang ekonomi
	Melakukan penyelarasan dengan perkembangan global terkait isu standar, HKI dan lingkungan	Peningkatan kepedulian masyarakat tentang lingkungan hidup	Belum optimalnya peran masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam menjaga lingkungan	Meningkatnya peran masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam menjaga lingkungan	Dilaksanakannya lomba pelestarian lingkungan hidup perkotaan dan perdesaan	Dilaksanakannya lomba pelestarian lingkungan hidup perkotaan dan perdesaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan
		Peningkatan kesadaran HKI	Masih rendahnya kesadaran HKI di masyarakat		Terlaksananya pelatihan HKI	Meningkatnya perlindungan HKI masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang HKI

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Arah Kebijakan						
		Peningkatan fasilitas <i>difabel</i>	Masih kurangnya fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i>	Tersedianya fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i> secara <i>bertahap</i> di ruang publik dan perkantoran	Terbitnya peraturan mengenai penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i>	Seluruh kantor dan ruang publik menyediakan fasilitas bagi masyarakat <i>difabel</i>	Tersedianya fasilitas untuk masyarakat <i>difabel</i> di ruang publik dan kantor pemerintah.
2	Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah						
	Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif	Pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Belum tersedia kebijakan dan infrastruktur klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Inisiasi terbentuknya kelompok kerja dan forum klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Terbentuknya kelompok kerja dan forum klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Terlaksananya secara terstruktur kelompok kerja dan forum klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	1. Terbitnya Peraturan Bupati bagi pengembangan klaster industri prioritas daerah 2. Berfungsinya kelembagaan pengelola pengembangan klaster industri
		Penyusunan rencana induk klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Belum tersedianya rencana induk klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Tersusunnya Ripparda	1. Tersusunnya rencana induk pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata secara terpadu 2. Implementasi Ripparda	1. Terlaksananya rencana induk pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata secara terpadu 2. Implementasi Ripparda	Tersusunnya rencana induk pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Arah Kebijakan						
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas dasar pariwisata 2. Pelatihan standar pelayanan peiaku pariwisata 3. Peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata 	Belum optimalnya infrastruktur dan standar pelayanan pariwisata serta rendahnya peran masyarakat di bidang pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan ke destinasi pariwisata mulai dikerjakan 2. Fasilitasi, pelatihan standar pelayanan di lokasi pariwisata 3. Bertambahnya pusat informasi pariwisata 4. Adanya peran serta masyarakat di bidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses jalan ke destinasi pariwisata lancar 2. Standarisasi pelayanan di lokasi pariwisata 3. Peningkatan pelayanan informasi pariwisata 4. Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur lancar 2. Seluruh pelayanan di lokasi pariwisata terstandarisasi 3. Mudahnnya mendapatkan informasi pariwisata 4. Terbentuknya pokmas dan pokdarwis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses jalan darat dan samna angkatan menuju destinasi wisata pantai, goa dan peninggalan sejarah 2. Tersedianya sarana dan fasilitas akomodasi wisata yang memenuhi standar fasilitas wisata domestik dan internasional 3. Tersedianya sarana kuliner, kesehatan dan sarana penunjang yang sesuai standar 4. Optimalisasi pusat informasi dan layanan kepariwisataan 5. Adanya pokdarwis dan pokmas di kawasan wisata
		Pengembangan pelaku wisata, jaringan kerjasama dengan agen dan biro perjalanan wisata domestik dan internasional	Belum berkembangnya pelaku wisata	Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan pelaku wisata	Meningkatnya kualitas SDM pelaku wisata	Pelaku wisata terstandarisasi	Tersedia dan berkembangnya pelaku wisata pantai, goa dan peninggalan sejarah yang handal dan profesional
		Pengembangan kawasan budidaya laut dan perairan, peningkatan produksi pertanian dan pariwisata	Belum adanya klaster industri berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Inisiasi terbentuknya klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata - Bantuan sarana produksi budidaya lele 	Terbentuknya kelembagaan, pemetaan peiaku usaha, lingkungan usaha dan penyusunan rancana aksi pengembangan budidaya tele	Implementasi rencana aksi Inisiasi pembenihan lele, pelatihan pembuatan pakan	Berkembangnya aktivitas perekonomian terpadu berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptekin/litbangyasa industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pasokan inovasi bagi klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 2. Pengembangan pasokan inovasi bagi klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 	Masih terbatasnya informasi iptekin bagi klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Pelatihan dan pendampingan agrofarmaka, pengolahan janggelan	Pelatihan dan pendampingan budidaya lele	Pelatihan dan pendampingan budidaya lele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pasokan iptekin (on-farm dan off-farm) di bidang industri janggelan, agrofarmaka dan lele. 2. Tersedianya iptekin industri pariwisata pantai, goa dao peninggalan sejarah
	Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi pengembangan klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Peningkatan interaksi antar klaster dengan penghasil iptekin	Masih rendahnya interaksi pelaku klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Terlaksananya kegiatan temu usaha janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Terlaksananya kegiatan temu usaha janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Terlaksananya kegiatan temu usaha janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Optimalisasi interaksi antara para pemangku kepentingan di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan pemasok iptekin
	Meningkatkan kualitas SDM klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan SDM	Peningkatan kualitas SDM untuk budaya inovasi di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Masih rendahnya kualitas SDM dalam budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi usaha klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata - Kegiatan gemar makan ikan - Lomba dan festival produk olahan - Studi banding pengelolaan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Pameran hasil-hasil produk olahan janggelan, agrofarmaka dan lele - Kegiatan gemar makan ikan - Lomba produk olahan - Tereiptanya paket-paket wisata dalam daerah maupun lintas daerah - Pameran, Road Show dan Talk Show Kepariwisata - Festival budaya daerah di dalam dan di luar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pameran hasil-hasil produk olahan janggelan, agrofarmaka dan lele - Kegiatan gemar makan ikan - Lomba produk olahan - Tereiptanya paket-paket wisata dalam daerah maupun lintas daerah - Pameran, Road Show dan Talk Show Kepariwisata - Festival budaya daerah di dalam dan di luar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas SDM dalam budaya inovasi di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 2. Berkembangnya budaya inovasi di klaster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Peningkatan sinkronisasi hubungan kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Belum adanya sinkronisasi kepentingan antara pelaku bisnis di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata	Terlaksananya pertemuan berkala antar pelaku usaha	Terlaksananya pertemuan berkala antar pelaku usaha	Terlaksananya pertemuan berkala antar pelaku usaha	Sinkronisasi kepentingan dan hubungan kerja antara pelaku bisnis dan masyarakat sekitar
	Meningkatkan rantai nilai kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Penguatan rantai nilai kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	Masih lemahnya rantai nilai kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya kelompok budidaya ikan (pokdakan) I kelompok - Berkembangnya kelompok usaha biofarmaka I kelompok - Berkembangnya kelompok usaha janggelan - Berkembangnya kelompok usaha pariwisata I kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya kelompok budidaya ikan (pokdakan) I kelompok - Berkembangnya kelompok usaha biofarmaka I kelompok - Berkembangnya kelompok usaha janggelan - Berkembangnya kelompok usaha pariwisata I kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya kelompok budidaya ikan (pokdakan) I kelompok - Terbeutuknya unit pakan dan obat-obatan - Berkembangnya kelompok usaha biofarmaka I kelompok - Berkembangnya kelompok usaha janggelan - Berkembangnya kelompok usaha pariwisata I kelompok 	Menguatnya rantai nilai di kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata
	Mengembangkan produk kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berwawasan lingkungan dan berstandar internasional	Peningkatan usaha kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan	Masih belum optimalnya kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata dalam pelestarian lingkungan	Menyusun kluster industri industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berbasis ekonomi	Melaksanakan kluster industri berbasis ekonomi	Berkembangnya kluster industri berbasis ekonomi	Aktivitas kluster industri janggelan, agrofarmaka, lele dan pariwisata berwawasan lingkungan dan berstandar internasional telah memenuhi kaidah kelestarian lingkungan
		Peningkatan standar kluster industri pariwisata	Masih belum terstandarnya pelaku kluster industri pariwisata	Standarisasi I pelaku kluster industri pariwisata	Standarisasi I pelaku kluster industri pariwisata	Standarisasi I pelaku kluster industri pariwisata	Aktivitas kluster industri pariwisata berstandar internasional.

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan kawasan khusus berbasis iptekin						
	Mempersiapkan berbagai kebijakan untuk pembaogunan kawasan khusus berbasis iptekin	Penyusunan perizinan telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Belum adanya perizinan telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Menyusun kebijakan tentang telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Sosialisasi telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Implementasi telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Tersedianya kebijakan tentang pengembangan telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian
		Penyusunan rencana detail perencanaan pembangunan telecenter berbasis iptekin	Belum lengkapnya dokumen perencanaan telecenter berbasis iptekin	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan telecenter	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan telecenter	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan telecenter	Tersusunnya rencana detail telecenter berbasis iptekin
	Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan iptekin /litbangyasa di kawasan khusus berbasis iptekin	Penguatan kelembagaaa litbangyasa daerah	Belum dimulainya pembangunan kawasan khusus berbasis iptekin	Terbangunnya kawasan khusus berbasis iptekin	Terbangunnya kawasan khusus berbasis iptekin	Terbangunnya kawasan khusus berbasis iptekiu	Menguatnya kelembagaan untuk penguatan iptekin /litbangyasa
		Peningkatan perlindungan HKI	Masih rendahnya kesadaran perlindungan HKI	Sosialisasi dan pelatihan 2 kelompok	Sosialisasi dan pelatihan 2 kelompok	Sosialisasi dan pelatihan 2 kelompok	Meningkatnya jumlah HKI terdaftar (per 10.000 penduduk)
	Menumbuhkembangkan kerjasama dan jaringan inovasi di kawasan khusus berbasis iptekin	Pengembangan kelembagaan pengelola telecenter berbasis iptekin	Belum tersedianya kelembagaan pengelola telecenter berbasis iptekin	Penguatan SDM kelembagaan telecenter	Penguatan hardware dan software	Penguatan konten	Terbentuknya lembaga pengelola telecenter berbasis iptekin

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Optimalisasi pemanfaatan pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i>	Belum optimalnya pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i>	Sosialisasi, pendampingan dan pelatihan	Sosialisasi, pendampingan dan pelatihan	Sosialisasi, pendampingan dan pelatihan	Optimalnya pemanfaatan pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i>
	Mendorong budaya inovasi di kawasan khusus berbasis iptekin	Pengembangan jaringan iptekin di kawasan khusus	Belum terbangunnya jaringan iptekin di kawasan khusus	Adanya 2 jaringan iptekin	Adanya 2 jaringan iptekin	Adanya 2 jaringan iptekin	Berkembangnya budaya belajar antara aktor inovasi iptekin di kawasan khusus
	Membangun jaringan kerjasama di kawasan khusus berbasis iptekin dengan kawasan serupa	Pengembangan jaringan kerjasama asosiasi nasional dan internasional	Belum masuknya Pacitan sebagai kawasan khusus berbasis iptekin dan anggota asosiasi internasional	Jaringan iptekin dengan kawasan Pawonsari	Jaringan iptekin dengan kawasan Karismapawirogo	Jaringan iptekin dengan kawasan Karismapawirogo	Masuknya Pacitan sebagai kawasan industri berbasis iptekin dan anggota asosiasi internasional
		Perencanaan kerjasama	Belum adanya kerjasama dengan pusat unggulan nasional	Adanya MoU dengan pusat-pusat telecenter provinsi	Adanya MoU dengan pusat-pusat telecenter nasional	Adanya MoU dengan pusat-pusat telecenter nasional	Terbangunnya kerjasama dengan pusat unggulan nasional
	Membangun jaringan dan kerjasama internasional di kawasan khusus berbasis iptekin	Perencanaan kerjasama	Belum adanya jaringan dan kerjasama internasional kawasan khusus berbasis iptekin	Inisiasi kerjasama telecenter internasional	Inisiasi kerjasama telecenter internasional	Inisiasi kerjasama telecenter internasional	Terbangunnya jaringan dan kerjasama internasional kawasan khusus berbasis iptekin
4	Mendorong perkembangan usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya						

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mengembangkan skema pembiayaan bagi teknopreneur	Pengembangan skema pembiayaan bagi bisnis inovatif	Belum ada lembaga pembiayaan teknopreneur	Pertemuan dengan lembaga keuangan	Pertemuan dengan lembaga keuangan	Pertemuan dengan lembaga keuangan	Tersedianya 1 lembaga pembiayaan teknopreneur
	Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	Pembangunan fungsi dan peran kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	Optimalisasi dukungan pemda, sarana dan prasarana PLUT	Optimalisasi dukungan pemda, sarana dan prasarana PLUT	Optimalisasi dukungan pemda, sarana dan prasarana, dan operasional PLUT	Meningkatnya fungsi dan peran kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru
		Peningkatan kapasitas ipteknin UMKM	Masih rendahnya kapasitas iptekn	Pelatihan dan pendampingan akses teknologi untuk 1 kelompok	Pelatihan dan pendampingan akses teknologi untuk 2 kelompok	Pelatihan dan pendampingan akses teknologi untuk 3 kelompok	Meningkatnya kapasitas absorpsi iptekn UMKM
		Peningkatan semangat berwirausaha di kalangan pemuda	Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda	Diklat wirausaha baru untuk 40 orang	Diklat wirausaha baru untuk 80 orang	Diklat wirausaha baru untuk 120 orang	Meningkatnya inisiatif berwirausaha berbasis iptekn dari kalangan pemuda
	Mengembangkan interaksi antara penghasil iptekn dengan UMKM dan teknopreneur baru	Peningkatan kerjasama antara pemasok iptekn dengan UMKM	Masih rendahnya kerjasama pemasok iptekn dengan UMKM	Kerjasama dengan Balai batik Yogyakarta	Kerjasama dengan Solo Technopark	Kerjasama dengan Taman Pintar Yogyakarta	Berkembangnya kerjasama antara penghasil teknologi dan UMKM
	Membangun budaya inovasi di kalangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan dan pemuda	Peningkatan muatan kewirausahaan pada kurikulum Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Masih rendahnya budaya menciptakan lapangan kerja	Lomba inovasi dan desain batik, dll.	Lomba inovasi dan desain batik, dll.	Lomba inovasi dan desain batik, dll.	Berkembangnya budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan Akademi Komunitas Negeri Pacitan
	Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif	Pengembangan usaha potensial daerah	Rendahnya jenis usaha inovatif di daerah	Diversifikasi jenis usaha inovatif	Diversifikasi jenis usaha inovatif	Diversifikasi jenis usaha inovatif	Berkembangnya jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster industri prioritas

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Membangun kerjasama internasional untuk pengembangan teknopreneur	Peningkatan standar produk UMKM	Sedikitnya produk UMKM yang terstandar	Standarisasi produk	Standarisasi produk	Standarisasi produk	Produk dari bisnis inovatif terstandar, baik nasional maupun internasional
		Peningkatan kerjasama internasional bagi UMKM	Belum terjalimye kerjasama internasional bagi UMKM	Inisiasi MoU dengan UKM internasional	Inisiasi MoU dengan UKM internasional	Inisiasi MoU dengan UKM internasional	Terjalinnnya kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif
5	Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah yakni air bersih dan TTK						
	Mengembangkan kerangka umum terkait dokumen rencana induk dan regulasi untuk pengembangan inovasi hijau dalam menangani masalah air bersih dan TIK	Penyusunan rencana induk GID	Belum optimalnya implementasi regulasi pengembangan inovasi hijau dalam menangani masalah air bersih	Penyusunan rencana Induk GID mencakup pengembangan air bersih dan TIK	Penyusunan rencana Induk GID mencakup pengembangan air bersih dan TIK	Penyusunan rencana Induk GID mencakup pengembangan air bersih dan TIK	Tersedianya pedoman/panduan <i>green innovation development (GID)</i> mencakup air bersih
	Meningkatkan kapasitas lembaga	Pengembangan kelembagaan pemasok dan pengguna iptekin	Pengembangan kelembagaan pemasok dan pengguna iptekin untuk GID	Terbentuknya kelembagaan GID	Terlaksananya pelatihan dan workshop dan pelatihan tentang GID untuk pengembangan air bersih dan TIK	Terlaksananya pelatihan dan workshop dan pelatihan tentang GID untuk pengembangan air bersih dan TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya kelembagaan yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development (GID)</i> 2. Meningkatnya pasokan iptekin air bersih dan TIK 3. Meningkatnya kapasitas absorpsi masyarakat terhadap iptekin air bersih dan TIK